



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TRANSKRIP  
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN MENTERI AGAMA RI, KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
HAJI (BPH), DAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL (BPJPH)**

Tahun Sidang : 2024 – 2025  
Masa Persidangan : I (Satu)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024  
Waktu : Pukul 19.38 s.d. 01.25 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  
Acara : 1. Pembahasan Realokasi Anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024;  
2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penyelenggara Haji Tahun Anggaran 2025;  
3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2025.

Ketua Rapat : H. Marwan Dasopang, M.Si. (Ketua Komisi VIII/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Mc. Zaqqi Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII)

Pembuat Transkrip

Nama : Tri Sulis Setiyani, A.Md.A.Pkt.  
NIP : 19991217202404 2 001  
Jabatan : Asisten Perisalah Legislatif Terampil

Nama : Muhamad Rafi Zulfikar, A.Md.AP.  
NIP : 20001206202404 1 001  
Jabatan : Asisten Perisalah Legislatif Terampil

Nama : Zahrani Putri Desta Sania, A.Md.  
NIP : 20011209202404 2 001  
Jabatan : Asisten Perisalah Legislatif Terampil

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan, bisa kita mulai?

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII,  
Yang terhormat Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta seluruh jajaran,  
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali rapat kita hari ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama, Kepala BPH, dan Kepala BPJPH.

Sebagaimana biasa di Komisi VIII, sebelum acara ini kita lanjutkan. Kita awali dengan berdoa, doa dengan membacakan umul kitab bagi yang beragama Islam dan yang lain menyesuaikan.

Berdoa dimulai.

**(BERDOA)**

Terima kasih.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang telah diputuskan dalam rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan sesuai keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 23 Oktober yang lalu, maka pada hari ini, hari Rabu, 4 Desember 2024, Komisi VIII akan menyelenggarakan rapat dengan agenda:

- Satu, pembahasan realokasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2025;
- Yang kedua, pembahasan rencana kerja dan anggaran Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia tahun anggaran 2025;
- Ketiga, pembahasan rencana kerja dan anggaran BPJPH Republik Indonesia tahun anggaran 2025.

**Hadirin yang saya hormati,**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, rapat hari ini telah dihadiri 36 anggota, 8 fraksi, minta izin 3 anggota dari 41 anggota di Komisi VIII Republik Indonesia. Dengan demikian rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi VIII, maka sesuai dengan tatib DPR RI Pasal 281 ayat (1), kuorum telah tercapai.

Atas persetujuan Pimpinan dan para Anggota, serta Menteri Agama, Kepala BPH, Kepala BPJPH, rapat ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: TERBUKA)**  
**(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.38 WIB)**  
**(KETUK PALU 1 KALI)**

Acara rapat kita hari ini:

- Satu, pengantar,
- Yang kedua, nanti akan ada penjelasan dari Menteri, kemudian akan kita beri kesempatan kepada Kepala Badan, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, nanti akan ada
- Tanya jawab, akan ada
- Kesimpulan,
- Penutup yang perlu mendapat persetujuan dengan para anggota.

Apakah rapat agenda kita itu dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETUK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya rapat ini akan berakhir pada pukul...

Sekarang telah kita mulai di pukul 17.40, 19.40, maaf. Kita akhiri satu jam, dua jam.

Jam 21.00 ya?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Kami ingin sebelum diserahkan ke Pak, Pak Menteri, kami mendapatkan catatan atas anggaran yang telah tercantum. Perlu kami sampaikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang telah diubah sebanyak tiga kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Tugas Komisi DPR RI di bidang anggaran antara lain, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi.

Sejatinya anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia untuk

tahun anggaran 2025 telah disetujui Komisi VIII DPR RI pada tanggal 11 September 2024 sebesar Rp.79.168.712.037.000. Dan anggaran ini dialokasikan berdasarkan Eselon, ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Moderasi Beragama, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jadi 79 triliun lebih dialokasikan dengan 11 item.

Namun karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk 2 lembaga baru, yaitu Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dimana secara kelembagaan awalnya merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, BPH dan BPJPH pada tahun anggaran dua puluh, 2025, harus mendapat persetujuan dari Komisi VIII Republik Indonesia. Hal ini mengacu kepada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan atau Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR RI melalui Pimpinan Alat Kelengkapan yang khusus menangani urusan Kementerian/Lembaga dimaksud.

Maka persetujuan kita, kalau ada persetujuan malam ini, ini mengikat pengalokasian anggaran, tidak lagi dibawa ke paripurna, berdasarkan undang-undang APBN. Karena itu, kami telah mendapat surat dari Kementerian Agama tentang pengalokasian anggaran untuk ditetapkan pada raker di Komisi VIII. Demikian juga kami sudah mendapatkan surat dari Badan Penyelenggara Haji tentang pengalokasian anggaran. Dari BPH, BPJPH kami tidak mendapatkan surat, tetapi bukan berarti tidak dapat surat, maka pengalokasian ini tidak, ya cukup sebetulnya dari Kementerian Agama karena belum kita pisah.

Sebelum kami serahkan ke Menteri Agama. Di dalam catatan kami ini, bahwa anggaran Badan Penyelenggara Haji untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.129.739.976.000. Di internal Komisi VIII ini menjadi diskusi, karena kami telah mengajukan pengusulan pembentukan undang-undang prioritas untuk tahun ini dan kami berhasil meyakinkan Pimpinan DPR dalam pembahasan undang-undang ini bisa sejalan Undang-Undang tentang Haji dan Undang-Undang BPKH.

Tidak semua Komisi boleh mendapatkan kesempatan membahas sekaligus, tapi kita meyakinkan kalau ingin perubahan atau revisi Undang-Undang Haji itu harus bersamaan dengan Undang-Undang Keuangan Haji. Maka Pimpinan DPR resmi telah memberikan persetujuan, ini atas perjuangan Pak Abidin Fikri ini. Waktu beliau melapor di Baleg, ya saya bilang kalau perlu ketok meja ya digeprak aja Pak Abidin, saya bilang. Itu kita sudah berhasil untuk meyakinkan Pimpinan DPR RI, ya.

Tentu di dalam bayangan Anggota DPR RI, bila kami dapat menuntaskan undang-undang ini, maka sepenuhnya yang menyelenggarakan ibadah haji itu adalah BPH, Badan Penyelenggara Haji. Maka kami coba-coba

melihat 129 miliar ini sudah dipahami dengan baik atau tidak oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji?

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA HAJI (KH. MOCHAMAD IRFAN YUSUF):**

*Inshaallah* sudah.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Jangan dulu, nanti saja.  
Nanti ada forumnya.

Kalau di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebetulnya tidak ada *problem* karena itu sudah pindah, pindah dari anggaran yang disebutkan di dalam, produk halal memang anggarannya seperti itu. Sementara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1,5 triliun, maka bila ditetapkan saat ini menjadi 129 triliun.

Lah, kalau kami mensahkan undang-undang, karena tergetnya ya undang-undang ini menjadi payung. Penyelenggaran ibadah haji tidak lagi berdasarkan perpres, sehingga tidak menjadi perdebatan siapa yang menyelenggarakan, jadi sudah ada payung hukumnya. Maka kami belum memahami, sebetulnya ini didiskusikan antara Badan Penyelenggaraan Haji dengan Kementerian Agama maupun Dirjen Haji tentang anggaran ini. Kalau belum, kami khawatir anggaran ini tidak akan mampu menyelenggarakan ibadah haji tahun depan, kecuali kembali lagi ke Menteri Agama. Berarti kita tetap memberikan kesempatan menyelenggarakan haji ini tetap Menteri Agama. Ini yang kami belum memahami, apakah di dalam internal Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji ini sudah ada diskusi tentang apa yang harus dikerjakan ke depan. Maka program kerja ini akan mengikuti anggaran, kalau itu anggarannya kami kira tidak mungkin, tidak mungkin akan diselenggarakan seperti itu.

Nah, karena Pasal 51 tadi itu final dan mengikat dan hanya sekali kesempatan, berikutnya itu angan-angan. Kami ingin tambah, kami ingin butuh tambahan anggaran, itu angan-angan semua, belum tentu dapat. Nah, kalau kita putuskan itu, angan-angan tidak tercapai, bagaimana dengan penyelenggaraan ibadah haji kita?

Kira-kira itu pengantar dari kami, kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan, nanti akan terutama dengan Kepala BPJPH. Kalau belum kita dapatkan nanti seperti apa, karena kalau hitung-hitungan tidak mudah membuat hitung-hitungan ini tidak mudah, terkecuali sudah ada kesepakatan, kesepakatan diantara Badan Penyelenggara Haji dengan Kementerian Agama. Ini kan ada anak muda nih, wakilnya ini, wah kami segini sekian pun cukup nih, nanti tuntas kita buat. Ya, ayo kita ketok kalau itu.

Nah saya kira, kalau kami ya atas persetujuan saja, tapi ini tidak ada waktu kedua kali karena pasal ini hanya sekali. Begitu kita ketok kali ini, itulah

dia terakhir pasal ini. Berikutnya kalau mencari, mencari itu ya belum tentu dapat.

Ini pengantar, nanti para anggota akan menanggapi atau mungkin cara menyelesaikannya bagaimana kita buat, nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak Menteri, kami persilakan.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya,

*Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebijakan,  
Salam Kebajikan,*

*Alhamdulillah wa syukurillah wa shalatu wa salam wa ala rasulillah,  
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin shallahu alaihi  
wa salam, amma ba'du.*

**Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,  
Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta Wakil Kepala dan jajarannya,  
Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta Wakil Kepala dan jajarannya,  
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Agama yang hadir pada rapat kerja hari ini, serta  
Para hadirin-hadirat yang sama-sama *insyaallah* berbahagia.**

Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa ya, karena pertemuan ini sangat-sangat penting, karena kita akan bicarakan seperti apa yang digambarkan tadi oleh Pak Ketua. Di samping itu juga, kami juga akan mendapatkan semacam legitimasi dan kekuatan untuk mempercepat laju perkembangan yang kami akan tempuh ke depan, ya, karena kita berpacu dengan waktu yang sangat mepet ini, terutama yang berkaitan dengan haji, Pak Ketua.

Nah, kami menganggap bahwa pertemuan malam ini sangat-sangat penting, karena itu izinkan saya menyampaikan, ya, apa yang perlu kami sampaikan pada malam ini. Tentu yang paling prinsip yang kami akan sampaikan adalah kebijakan pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo ya.

**F-PKB (K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M.):**

Mohon maaf, Pak Menteri bisa agak keras.  
Ini suasananya malam dan dingin.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Iya.

Restrukturisasi di lingkungan Kementerian Agama yang tadinya hanya Kementerian Agama, tapi sekarang ini menjadi tiga entitas, ya. Ketiga entitas itu tentu adalah Kementerian Agama itu sendiri, terus yang kedua Badan Penyelenggara Haji BP Haji, dan yang ketiga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH.

Jadi pembentukan entitas tersebut itu berdasarkan pada peraturan presiden yang pada pertemuan kita yang lalu kita sudah banyak membahas nomor 152 dan 153 tahun 2004. Nah, berdasarkan perpres di atas, Kementerian Agama itu memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mencakup, antara lain pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, bimbingan masyarakat penyelenggaraan haji dan umrah, serta moderasi beragama. Selain itu, Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam urusan perumusan kebijakan terkait jaminan produk halal.

Nah, perubahan status BPJH dari unit organisasi setingkat Eselon I menjadi LPNK menyebabkan perampingan struktur organisasi dan perubahan postur keuangan di Kementerian Agama. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jaminan produk halal. Dalam hal ke- kebijakan teknis dan penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH ini memiliki kewenangan penuh. Namun kebijakan umum terkait jaminan produk halal saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Agama. Untuk menjelaskan, *eh* menjalankan fungsi kebijakan umum ini, rancangan Peraturan Menteri Agama yang sedang dibahas bersama dengan Kementerian PAN-RB memuat pembentukan unit terkait kebijakan jaminan produk halal paradisiu islam. Sedangkan pembentukan BP Haji tidak mengubah struktur organisasi paradisiu penyelenggaraan haji dan umrah.

Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan berkoordinasi dengan BP Haji. Selain karena aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ini juga dikarenakan karena proses penyelenggaraan haji tahun 2025 yang telah berlansung, sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini dapat berlansung dengan baik dan lancar, bahkan lebih baik kita harapkannya daripada tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Pak Ketua, saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan, bahwa apakah sudah berkoordinasi dengan BP Haji? *Inshaallah* Bapak, kami sangat intensif ya berkomunikasi, terutama antara Dirjen Haji dengan Ketua dan Wakil Ketua BPH. Dan yang kita bicarakan apa ya, jadi

prinsip kita itu adalah haji tahun depan ini harus sukses. Seperti apa, itu ada persepakatan-persepakatan yang kita lakukan, termasuk pembicaraan tentang anggaran ini. Jadi, kepastiannya *insyaallah* kami berdua nanti, Kementerian Agama dan BPH ini akan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang sebetulnya prosesnya sudah sedang berlangsung, tentu melalui juga yang mulia para Anggota DPR Komisi VIII ya.

Segitiga, entitas ini sangat penting. Tentu Kementerian Agama, BPH, dan Komisi VIII, inilah yang menentukan kelancaran dan kesuksesan ibadah haji akan datang. Karena itu, izinkan saya menyampaikan di sini struktur anggaran, perubahan alokasi anggaran tahun 2025 Kementerian Agama setelah restrukturisasi ini tentu juga harus melakukan penyesuaian. Makanya itu bagi kami tidak terlalu, belum terlalu detail kami lakukan pemilahan, tapi ini kami langsung menarik saja.

Dahulu kalau kita lihat, jadi mohom maaf, di halaman 14 itu, itu pengalokasian anggaran itu kan ada perubahan. Jadi misalnya Sekretaris Jenderal itu berapa, dan di sini kita copot saja, kita comot nomor 9 dan nomor 11 itu pindah menjadi satu distingsi tersendiri yang akan digunakan oleh badan yang baru untuk tahun ini. Dan kenapa haji sedemikian angkanya? Karena sedang dalam proses. Kami agak sedikit lebih mudah menyelesaikan persoalan jaminan produk halal, karena tidak terkait dengan masalah luar negeri. Tetapi kalau BPH, banyak hal yang terkait dengan di luar diri kita sendiri, kebijakan-kebijakan yang ada di Saudi Arabia, masih banyak yang sedang berproses sekarang ini juga, dan kita pun juga sedang berproses untuk menunggu *direction* dari, dari Pimpinan, mana yang paling mudah untuk kita lakukan nanti.

Sehingga dengan demikian, poin nomor sembilan ini, anggaran penyelenggaraan haji dan umrah dan juga Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini keluar dari angka total Rp.79.168.712.127, ya. Jadi itu singkatnya seperti itu, sedangkan nanti penyebarannya tidak ada perbedaan seperti apa yang pernah kami sampaikan juga dulu kepada Yang Mulia, bahwa rincian-rinciannya seperti tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Nah yang berbeda hanya pemilahan, pemisahan dari anggaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke Badan yang ada sekarang ini.

Nah pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi itu memang sangat penting ya, untuk kita jawab, ya. Dan nanti mungkin juga saya minta kepada teman-teman dari BPH untuk memberikan pendapatnya, ya bagaimana pertanyaan Pak Ketua tadi itu. Tapi bagi kami *insyaallah*, sangat kami komit bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji ini akan kita lakukan bersama-sama. Jadi seperti apa nanti, nah sesuai kita akan atur sesuai dengan distribusi anggaran dan kewenangan-kewenangan yang ada di, di pengalaman kita dalam melaksanakan ibadah haji ini. Itulah nanti yang kita akan bicarakan bersama secara teknis, secara mikro dengan teman-teman dari BPH.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Mungkin saya tidak membicarakan lebih, menyebutkan angka-angka

yang ada di belakang ini, karena itu adalah sama saja dengan laporan kami pada pertemuan kita yang lalu ya. Hal yang sangat penting kami laporkan pada pagi, eh malam hari ini adalah tadi itu, berapa angka untuk BPH dan berapa angka untuk jaminan produk halal, seperti yang tertera di dalam halaman, di halaman 6 itu. Jadi Badan Penyelenggara Haji itu Rp.129.739.976.000, sedangkan badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan Rp.436.812.997.

Dengan demikian, inilah nanti yang akan dijadikan semacam dana awal untuk penyelenggaraan ibadah haji oleh teman-teman dari bp, bp, BPH. Sedangkan untuk penyelenggaraan jaminan halal, ini bisa memanfaatkan sepenuhnya, karena memang ini apa ya, istilahnya organisasinya sudah *running* sebetulnya, kecuali haji ini memang karena terkait dengan banyak hal, terkait dengan undang-undang yang sementara kita sedang menantikan, ya,

Dan saya kira inilah Yang Mulia, kira-kira yang sangat prinsip pada malam ini untuk kita bicarakan bersama. Kalau boleh saya akhiri, kita nanti diskusikan bersama.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sudah Pak Menteri?

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Kami persilakan ke Badan Penyelenggara Haji.

**KETUA BADAN PENYELENGGARA HAJI (KH. MOCHAMAD IRFAN YUSUF):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Yang kami hormati Menteri Agama RI,  
Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI,  
Yang kami hormati Wakil Menteri Agama RI,  
Yang kami hormati Wakil Kepala BP Haji RI,**

**Yang kami hormati Wakil Kepala BPJH, BPJPH RI,  
Yang kami hormati para Pejabat Eselon I, Eselon II pada Kementerian  
Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta  
Hadirin yang berbahagia,**

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah, malam ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus berkumpul dalam rangka rapat kerja dengan agenda pembahasan realokasi anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025, rencana kerja anggaran Badan Penyelenggara Haji, dan BPJPH RI tahun 2025.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi, apresiasi kami dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah menyetujui Badan Penyelenggara Haji atau lebih mudahnya kita sebut BP Haji RI menjadi mitra Komisi VIII DPR RI pada rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dan terus memberikan perhatian serta dukungan kepada BP Haji.

Sesuai dengan Perpres 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, BP Haji memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan Haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari BP Haji sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji;
- Yang kedua, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji;
- Yang ketiga, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan haji;
- Yang keempat, koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
- Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab Badan;
- Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan, dan
- Yang tujuh, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

Dalam persiapan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2025, termasuk juga pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Kami menyampaikan tentang hubungan struktur, struktural antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, serta BP Haji. Seperti yang kita ketahui bersama, Ditjen PHU adalah salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Agama yang selama ini melaksanakan tugas dan fungsi yang spesifik dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Sementara BP Haji adalah badan setingkat kementerian yang dibentuk dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada masa transisi dari Dirjen PHU ke BP Haji, kami membangun fungsi

koordinatif antara BP Haji dengan Kementerian Agama. Fungsi koordinatif inilah yang kemudian menurunkan rencana kerja dan struktur anggaran BP Haji tahun dua puluh, 2025.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Pasca pelantikan kami berdua sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji, kami langsung melakukan langkah koordinasi dengan Kementerian Agama sebagai Kementerian pengampu lembaga baru. Koordinasi selanjutnya kami melakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Perpres tentang Badan Penyelenggaraan Haji dan SOTK. Selanjutnya, dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan kami membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2024. Itu kami lakukan pada saat belum turun perpres, sehingga ini cuma hanya kami lakukan berdua saja, saya sebagai Kepala dan Bang Daniel sebagai Wakil Kepala.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,**

Untuk anggaran operasional BP Haji tahun 2024 telah dialokasikan dari anggaran Kementerian Agama. Dalam hal ini, anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp.12.554.840.000. Untuk anggaran tahun 2025 telah kami bahas dan sepakati secara bersama-sama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama sebesar Rp.129.739.976.000 dengan kondisi, bahwa pada saat pembahasan tersebut ada berbagai hal:

- Yang pertama, Perpres 154 tahun 2024 belum terbit, sehingga saat penyusunan, penyusunan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang tercantum dalam Perpres;
- Yang kedua, pagu anggaran secara nasional untuk Kementerian/Lembaga telah ditetapkan dengan Undang-Undang APBN Nomor 62 Tahun 2024 pada bulan Oktober tahun 2024;
- Yang ketiga, pagu anggaran untuk Kementerian Agama juga telah ditetapkan, sehingga sulit bagi kami untuk melakukan pergeseran anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran pada Kementerian Agama;
- Yang keempat, pagu anggaran untuk BP Haji berasal dari pergeseran anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yang secara tugas dan fungsi masih menyelenggarakan ibadah haji untuk tahun 2025, sehingga harus tetap mempertimbangkan kelancaran operasional haji.

Dengan mempertimbangkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tidak terganggu, kami menyepakati untuk menggeser anggaran Ditjen PHU Kementerian Agama yang penggunaannya di akhir masa operasional haji, dengan rincian pergeseran sebagai berikut:

- Anggarannya seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, yang terdiri atas:

- Anggaran Satker Ditjen PHU sebesar lima puluh dua juta, *eh* Rp52.090.619.000 dengan rincian, mengambil program KULKB sebesar Rp29.810.991.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam, dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu;
- Anggaran Satker Atase Haji KJRI Jeddah sebesar 77.649.357.000 dengan rincian, program KULKB sebesar 72.670.839.000 dan program Dukman sebesar 4.978.518.000.
- Rencana penggunaan awal digunakan untuk sebesar 129 miliar itu akan digunakan untuk program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Pertama, program KULKB sebesar Rp63.103.713.000 dengan rincian:
    - ✓ Kegiatan dukungan administrasi dan dokumen haji reguler sebesar 9.631.111.000,
    - ✓ Kegiatan dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri 3.562.366.000,
    - ✓ Kegiatan dukungan bina haji 36.354.118.000, sementara
    - ✓ Kegiatan dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi luar negeri 9.057.334.000, sementara
    - ✓ Kegiatan pengawasan 4.498.784.000.
  - Program dukungan manajemen sebesar 66.636.263.000, digunakan untuk operasional yang terdiri atas:
    - ✓ Belanja pegawai sebesar tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh tiga ratus dua puluh delapan, tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dan operasional perkantoran sebesar 27.440.330.000, sementara
    - ✓ Non-operasional Dukman sebesar 30.438.505.000.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga perlu menyertakan persetujuan Komisi terkait di DPR RI atas alokasi anggaran untuk pengesahan DIPA Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mohon kiranya Komisi VIII yang terhormat dapat menyetujui besaran alokasi anggaran BP Haji untuk tahun 2025 sebesar Rp129.739.976.000 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,**

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa setelah proses pembahasan anggaran dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Agama sebesar 129.739.976.000 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu) disepakati, terbitlah Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. Selanjutnya, bersama Kementerian PAN-RB, kami menyusun SOTK BP Haji. Pada tanggal 21 November 2024, telah disepakati SOTK BP Haji dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum untuk ditetapkan sebagai SOTK BP Haji oleh Kepala Badan.

Berkenaan dengan pertimbangan SOTK tersebut, kami mengusulkan tambahan anggaran BP Haji untuk tahun 2025 sebesar 226.904.218.000 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus delapan belas ribu). Di luar anggaran pergeseran dari Kementerian Agama yang semula yang 129.739.976.000, sehingga totalnya menjadi Rp356.644.194.000 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Program KUL, KULKB sebesar 89.353.325.000, sementara program Dukman sebesar 267.290.869.000;
- ✓ Program KULKB sebesar 89 miliar itu digunakan untuk membiayai kegiatan tiga Deputi, masing-masing:
  - Deputi bidang koordinasi pelayanan haji dalam negeri sebesar 52.347.239.000,
  - Deputi bidang koordinasi pelayanan haji luar negeri sebesar 18.603.198.000, dan
  - Deputi bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji sebesar delapan belas miliar empat ratus dua ribu, empat ratus dua juta seratus delapan ribu.

Ini berdasarkan SOTK yang telah kita sepakati kemarin.

Program Dukman sebesar 267 miliar itu digunakan untuk anggaran operasional sebesar 65 miliar, dengan rincian belanja pegawai sebesar 3.757.328.000 dan operasional perkantoran sebesar 61.851.841.000. Anggaran non operasional dua ratus satu ribu, 201.681.700.000. Banyak, ada beberapa hal-hal yang lain, tetapi secara umum, Biro Sumber Daya Manusia dan Hukum serta, sebesar Rp30.347.991.000 akan digunakan untuk layanan hukum dan peraturan perundang-undangan, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang meliputi penyusunan, penyusunan naskah akademik, uji publik, dan diseminasi yang melibatkan *stakeholder* perhajian serta untuk penataan pegawai.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,**

Selanjutnya untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji tahun 2025 dan beroperasi lembaga baru BP Haji, dalam catatan *Trilateral Meeting* antara BP Haji, Kementerian Keuangan, dan Bappenas disepakati akan segera lakukan revisi anggaran tambahan pada tahun 2025. Sehubungan

dengan hal tersebut, kami memohon dukungan dan persetujuan Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas usulan anggaran tambahan dimaksud.

Demikian kami sampaikan usulan rencana kerja dan anggaran BP Haji tahun 2025. Kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, penyelenggaraan ibadah haji.

Berkaitan dengan pertanyaan dari Ketua Komisi VIII tadi tentang cukupkah ini untuk penyelenggaraan haji 2026?

Tentu tidak cukup.

Kalau ini untuk 2025, karena tadi pertanyaan tadi, karena pasca penyelenggaraan haji 2025, kita langsung tancap gas untuk menyelenggarakan 2026, apakah cukup? Tentu tidak cukup.

Kenapa kita hanya minta sekian? Karena anggaran 356 miliar tadi hanya anggaran Satker BP Haji di tingkat pusat saja. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran Satker bidang haji di bidang provinsi, Satker UPT Asrama Haji, Satker Atase Haji. Karena perpres yang mengatur ini belum ada, sehingga kita tidak berani mengajukan anggaran untuk ke, ke beberapa post tadi ini. Jadi itu untuk yang kenapa kita hanya meminta 356.

Akhirnya dengan mohon kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho-Nya, serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya dan kemakmuran bangsa dan negara pada umumnya.

Tambahan.

Kita juga ada MoU dengan Kementerian Agama tentang *sharing* penyelenggaraan haji, dimana juga, termasuk juga ada *cost sharing* untuk penyelenggaraan haji 2025 dengan, dengan PHU juga. Saya kira itu, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Wa'alaikumsalam,*

Tapi MoU belum dikirim ke Komisi VIII ya, Pak Kepala?

**KETUA BADAN PENYELENGGARA HAJI (KH. MOCHAMAD IRFAN YUSUF):**

Belum, belum.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Belum?

**KETUA BADAN PENYELENGGARA HAJI (KH. MOCHAMAD IRFAN YUSUF):**

Belum.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Belum ya, *oke*.

Kita bergeser ke Kepala Badan, Badan Jaminan Produk Halal. Sebetulnya sini tidak ada masalah. Kalau BPJPH ini kan sebetulnya kita targetkan akan menghasilkan duit mestinya, bukan, bukan meminta-minta anggaran. Dia nanti kasih satu izin halal itu bisa di-*switch* ke badan haji. Tapi karena Babe Haikal ini belum pernah kita dengar suaranya, ya kita kasih kesempatan juga nih.

Silakan, Pak Kepala.

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (AHMAD HAIKAL HASAN):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus, kami mengirimkan surat kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, karena beberapa yang kami datangi belum sertifikasi halal, termasuk juga di DPR RI ini yang terhormat dan ternyata sekarang sudah ada logo halal disisinya. Terima kasih.

Apresiasi yang tertinggi buat teman-teman semua.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera buat kita semua,  
Selamat malam,

**Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI dan seluruh Wakil Ketua, serta Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang kami hormati Menteri Agama RI, Wakil Menteri Agama, beserta jajaran Kementerian Agama,**

**Yang kami hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta Bapak/Ibu hadirin sekalian,**

Setelah bersyukur kepada Allah dan bershalawat kepada Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan saya tidak mengulang lagi apa yang diucapkan oleh Pak Menteri tadi tentang Peraturan Presiden Tahun 2024 Nomor 153 yang menyatakan BPJPH atau biar gampang saya akan sebut Badan Halal. Badan Halal, ya, menyelenggarakan ketentuan perundangan yang berfungsi:

- Pertama, perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal,
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal,
- Koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Halal,
- Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Halal,
- Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Halal, serta
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di bidang lingkungan Badan Halal.

Perlu saya ungkapkan bahwa sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka Badan Halal punya visi besar, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi pusat halal dunia. Dan laporan yang tadi baru saja masuk, CNBC melaporkan 20.000.000.000.000 transaksi terjadi di urusan halal dan dunia mengharapkan pusatnya itu berada di Indonesia. Insyaallah *amin* ya *rabba* *alamin*.

Nah dalam melaksanakan visi besar ini, badan halal punya empat misi, yaitu meningkatkan kualitas kemitraan dalam dan luar negeri, dalam mewujudkan ekosistem halal global. Misi kami itu adalah:

- halal Indonesia, badan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Itu yang kami akan sampaikan dan akan kami wujudkan,
- yang kedua, menjaga kesinambungan dan keterjaminan produk halal,
- yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan yang merata, berkualitas, inklusif, tentu lebih murah, lebih hemat, lebih cepat, dan lebih efisien,
- mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam melaksanakan empat misi ini, badan halal tentu sejalan dengan prioritas Presiden dalam astacita, yaitu yang nomor 8, memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dalam lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur. Dan astacita nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Nah berdasarkan tujuan strategis di atas, badan halal merumuskan rencana kerja di tahun 2025.

- Pertama, sertifikat halal sehat, yaitu se, se, ini program gratis, sehat itu sertifikat halal gratis sebanyak 1.200.000 pengusaha. Ya, itu target kami dan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan juga dan 10.000 sertifikat halal reguler, itu pertama,
- Yang kedua, penguatan regulasi,
- Tiga, sosialisasi dan publikasi,
- Yang keempat, kolaborasi kemitraan,
- Kelima, digitalisasi pelayanan, dan
- Yang keenam, penerapan sanksi tentunya.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,**

2025 seperti yang tertera tadi, alokasinya persis 436 miliar, ini ternyata cuma 0,55 dari seluruh anggaran Kementerian Agama. Terima kasih.

Namun dari 436 miliar ini, 63 persennya kita lakukan untuk sertifikasi halal gratis bagi UMK, UKM. Ya, UMKM ya, unit kerja mikro ya, mikro dan kecil, 63 persen. Jadi 28 persennya untuk pendukung sertifikat halal dan hanya 9 persen untuk belanja operasional.

Dan saya lanjut ke badan, bagian fungsi, berdasarkan fungsi berpacu dengan waktu ini, Pak Ketua. Aman ya?

Nah ini yang penting yang ingin saya sampaikan, karena berdasarkan fungsi alokasi anggaran badan halal tahun 2025 yang akan datang ini bersumber satu fungsi saja, yaitu fungsi agama saja. Namun pada kenyataannya survei kami, riset kami menunjukkan irisan itu terjadi pada fungsi ekonomi. Serbuan produk China, produk Korea, produk Amerika, produk Argentina, Brazil itu luar biasa masuk ke Indonesia semua dengan sertifikat halal. Sementara kita belum dari target 66 juta pelaku usaha yang 14 juta diantaranya itu adalah kuliner, belum mampu kita lakukan untuk kuliner ini kalau tidak dengan dukungan semua pihak yang terkait. Apa akibatnya kira-kira?

Masyarakat secara otomatis akan memilih produk yang halal dan yang diambil produk luar negeri. Dan ini sangat rawan, sehingga kita berpikir bahwa penguatan dari fungsi ekonomi harus kita lakukan. Karena itu dalam satu bulan terakhir ini, kami melakukan gerilya. Pertama, kepada Kementerian Bappenas PPN, Kementerian, Kementerian Keuangan, kemudian untuk kepada Kementerian Perindustrian, kemudian kepada Kementerian Pertanian, sampai ke Badan Gizi, sampai ke semua yang terkait itu kami datangi untuk kami ajak diskusi, apa yang seharusnya kami lakukan. Dan ternyata sumber dana yang 436 miliar ini, murni dari anggaran 378 sementara BLU 57.

**Yang terhormat semua hadirin,**

Izinkan kami menyampaikan, bahwa selanjutnya yang penting disini adalah menyampaikan usulan anggaran. Untuk memenuhi tadi, usulan anggaran yang kami ajukan adalah 1.020.000.000 (satu triliun dua puluh miliar) ada dalam tabel ini. Ini adalah sebuah rencana yang kami sudah perhitungkan

dengan sangat matang, bahwa dititikberatkan dengan dua poin.

Yang pertama, rencana menjadikan nomenklatur daripada badan halal menjadi satu atap. Kalau sekarang ada tujuh langkah. Nomor satu, *start*. Nomor dua, pelaku usaha melakukan melakukan verifikasi dalam sistem, sistem informasi halal, validasi, kemudian LPH Lembaga Pemeriksa Halal melakukan verifikasi. Kemudian, auditornya meninjau lapangan. Kemudian, dan seterusnya, Bapak/Ibu. Sampai kemudian, bahkan penentuan fatwa pun bukan di dalam badan halal. Akhirnya, ujungnya yang paling bawah, stempel, hanya itulah yang menjadi fungsi badan halal, dan ini kurang sehat. Kenapa akhirnya langkah kami selalu ada beberapa poin di atasnya yang menentukan orang lain.

Karena itu, tambahan yang kami usulkan 1 triliun ini, 1 triliun 20 miliar ini kami lakukan untuk, satu, rencana menjadikan satu atap. Ini demi menghindari pungli dan kami sudah menemukan banyak sekali dalam proses-proses halal, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Ketua. Tingginya biaya pengurusan sertifikasi halal yang betul-betul *uncontrollable* yang telah terjadi. Dan kemudian independensi daripada badan halal dalam melayani masyarakat.

Dan yang penting juga, yang sudah kami lakukan selain fungsi agama yang fungsi ekonomi ini adalah telah dibahas, kami garis bawahi telah dibahas dan diputuskan bersama untuk masuk dalam RPJMN 2025 ke depan, bersama Kementerian PPN Bappenas sesuai arahan daripada Kementerian Keuangan dan kami juga ajak banyak diskusi bersama Kementerian Perindustrian Dalam Negeri, Pertanian, bahkan Badan Gizi. Dan alhamdulillah, dalam RJPNM ini, Kementerian Bappenas telah menunjukkan dalam prioritas 2, yaitu program Prioritas Ekonomi Syariah yang memasukkan dalam KP1 yaitu industri halal, KP2 ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, dan KP3 pembangunan ekosistem halal. Lebih rinci kami lakukan ada 10 poin penguatan yang akan kami lakukan, yaitu adalah pertama, menyusun kebijakan tentang pembangunan ekonomi syariah melalui penguatan kebijakan jaminan produk halal.

Kedua, meningkatkan kapasitas *entrepreneur* dalam meningkatkan dan menembus pasar produk halal, domestik dan global. Kemarin kami baru saja melakukan sidak ke tempat pemotongan hewan, RPH Rumah Pemotongan Hewan di Cakung, ya. Dan kami lihat memang perlu sekali gitu loh, kami lakukan ini terus, karena RPH ternyata yang ada dari lima ratus, 578 ya, koreksi kalau salah ya. Itu baru 200 sekian yang RPH-nya halal gitu. Ini PR lagi buat kami, memang ini dibawa kementerian Kemtan dan Pemda, tapi pasti yang ditanya adalah kita karena pelatihan ini akan kita lakukan, yaitu kita sebut juleha.

Juleha ya, Pak, ya?  
Jurus sembelih halal, ya.

Ada satu cerita, satu restoran, itu datang kepada kami dan dia mengeluh, sudah hampir setahun sertifikasi halalnya belum bisa keluar. Kami undang dan kami bedah. Ternyata, restoran ini mengambil daging dari RPH

yang belum halal. Jadi inilah yang terjadi, saya bilang ini jadinya kami banyak sekali menemukan temuan-temuan, ya. Jadi kemudian memperkuat ekosistem dan industri halal bersama *stakeholder* lokal yang lain. Kami sudah juga ikut bersama Menteri Dalam Negeri yang meminta nantinya sertifikasi halal menjadi salah satu ukuran dalam penilaian setiap Gubernur dan Kepala Daerah. Karena kalau kita gak bergerak sekarang, sementara AFTA sudah masuk rame-rame barang-barang itu, kita akan tergilas dan UMKM kita akan gulung tikar, karena masyarakat secara otomatis akan memilih yang halal.

Penguatan SDM di lembaga pendamping dan pemeriksa halal,

Pembangunan jaringan ekosistem halal di lembaga pendidikan dan dunia usaha. Perlu saya contohkan satu, ketika kami melakukan kunjungan di salah satu raksasa industri, yaitu Indofood. Satu perusahaan Indofood ini, dia memiliki 836 auditor halal internalnya dia dan dia memiliki 156 penyelia halal yang mendampingi. Nah ini yang saya akan *copy paste* kepada perusahaan-perusahaan lain, tentunya itu menjadi beban kita dalam melakukan pelatihan. Tentu ini yang kami maksud, penguatan kapasitas SDM.

Membangun di jaring ekosistem halal di lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Penguatan kemitraan jaminan produk halal dalam dan luar negeri. Kami sudah bekerjasama dengan 54 negara dan 152 LHLN seluruh luar negeri. Dan ini perlu sekali karena baru saja kami temukan satu kasus di Amerika, RPH di Amerika kami temukan tidak melakukan pemotongan sesuai dengan syariat dan barang itu masuk ke Indonesia. Dan akhirnya, kami didatangi oleh wakil daripada Duta Besar dan wakil daripada Kementerian untuk dia bertanya kepada kami mengapa, kami jelaskan bahwa proses yang dilakukan di rumah potong Omaha Amerika ini tidak sesuai dengan syariat dan kami akan berjuang untuk menahan produknya masuk ke dalam Indonesia tercinta ini karena prosesnya tidak halal. Ini pun kami lakukan.

Yang ke-tujuh, penelitian potensi dasar, potensi pasar, maaf, global daripada produk halal.

Yang ke-delapan, *scale up* produk halal UMK untuk go internasional. Tanggal 20 sampai 25 Januari yang akan datang ada Mekah Halal Forum, dimana 171 negara akan datang dan hadir dan kami bersyukur salah satu pembicaranya adalah kami sendiri dan ini adalah sebuah peluang untuk mengenalkan OMK kita ke go internasional.

Yang ke-sembilan, penyusunan standar halal global. Dimana kita punya cita-cita dan sudah digaungkan di halal dunia internasional, Indonesia akan menjadi pusat dan acuan halal seluruh dunia, tentu dengan dukungan dari para teman-teman sekalian.

Yang ke-sepuluh, penguatan infrastruktur, data, dan teknologi informasi. Hari ini belum, namun kami bekerjasama dengan yang sudah punya modal banyak, diantaranya Bank Indonesia. Bank Indonesia menyiapkan *traceability*,

jadi nantinya setiap produk bisa di-*trace*, ini dari rumah potong mana, apakah sudah tersertifikasi halal atau belum, dan seterusnya.

Terima kasih, Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak Menteri Agama dan Wakil, Bapak Badan Haji, Umroh Haji, Haji, ya, dan Wakil. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan penyampaian penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan. Walaupun Pak Marwan sudah mendengar suara saya di televisi, baru kali ini kita ngomong langsung ya, Pak.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (AHMAD HAIKAL HASAN):**

Salam sejahtera buat kita semua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Terima kasih.

Para mitra sudah menyampaikan, ada yang program kerja, ada yang pengalokasian anggaran.

Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, BPJPH tidak ada hal yang menjadi diskusi kita, tetapi dalam hal program tentu nanti akan kita bahas lagi. Malam ini mengalokasikan anggaran terlebih dahulu, nanti yang disampaikan 10 item rencana itu nanti kita bahas. Karena banyak, ini banyak anggota ini. Jangan dulu menjadi acuan dunia, motong ayam aja di tempat kita *nggak* jelas, buang, buang gitu, *nggak* mati ayam karena dipotong, karena ditimpa-timpa. Satu keranjang ditimpa, mati gitu. Nah itu kita selesaikan dulu, makanya nanti program kita bahas.

Melihat Badan Penyelenggara Haji sepertinya sudah *nggak* ada masalah ini, kalau *nggak* ada masalah ya kita ketuk saja. Saya sudah mengingatkan, bahwa setelah Agustus, jadi Oktober, November, Desember itu sudah mulai kita persiapan menyelenggarakan ibadah haji 2026, anggarannya ini. Apakah itu sudah dibicarakan pada saat dulu membicarakan ini?

Kalau tidak dibicarakan, harus dibicarakan, karena begitu masuk besok pelaporan penyelenggaraan di ibadah haji 2025. Itu kan setelah Agustus, kita langsung masuk persiapan Haji 2026, dan itu amanatnya sudah berada di Badan Penyelenggara Haji. Nah itu anggarannya yang ini, kan *nggak* mungkin, ini sudah habis ini dipakai. Kami menduga bahwa itu tidak dibicarakan, tapi

kalau sudah ridho ini anggarannya, ayo kita ketok. Saya ketok nih, kita setuju.

Yang kedua, semua ini BPJPH, BPH, tidak ada forum disini tambahan anggaran, *nggak* ada, kami tidak membuka itu. Kalau kami buka, kami dimarahin nanti, *nggak* ada forum minta tambahan anggaran. Disini penetapan pengalokasian anggaran, pasal 51-nya. Jadi berbusa-busa pun kita menyebutkan minta tambahan anggaran, itu *nggak* akan kita bahas, kami akan ditegur nanti, karena *nggak*, tidak forumnya. Nanti tunggu aja, nanti pembahasan 2026, ada forumnya minta tambahan anggaran, sekarang *nggak* mungkin.

Nah, kalau ini dianggap sudah disetujui, ya kita tinggal ketuk siapa. Prinsipnya sebetulnya amanat Pasal 51 itu, ya karena tidak, kan tuh pasal ini memudahkan bagi mitra kerja, tidak dibawa lagi ke forum paripurna, dibawa cukup di komisi-komisi masing-masing kalau ada pengalokasian. Nah tapi kalau ini tidak tuntas, tentu butuh diskusi lagi, tapi itu pun saya serahkan dulu lah ke para anggota, bagaimana para anggota memandang ini. Apakah kalau kita serahkan saja, kita sahkan, tidak menyulitkan nanti atau bagaimana. Ya, anggota boleh juga menyampaikan hal tentang pengalokasian anggaran.

Kami persilakan.

**ANGGOTA KOMISI VIII (.....):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini banyak ini, ini nambah, nambah waktu kita keliatannya.

**ANGGOTA KOMISI VIII (.....):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Saya tidak berdasarkan fraksi ya, saya suka-suka Pimpinan dulu lah sekali ini ya. Sekali-sekali ya, sekali-sekali.

Yah ini, Pak Achmad.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan beserta Wakil, seluruh Anggota Komisi VIII,  
Pak Menteri, Pak Wamen, seterusnya**

**BPH, Wakil,  
Badan Penyelenggaraan Produk Halal serta jajaran seluruh staf,**

Terima kasih.

Ini masalah haji, Pak. Ini kan ada dua matahari ini sepertinya, ya kan? Ada Kementerian Agama, ada Badan Penyelenggaraan Haji. Nah, di sini menyangkut kewenangan. Pak Menteri Agama tadi menyampaikan, bahwa penyelenggaraan haji itu tetap dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Ya, 2025 ini, Pak.

Sementara dari BPH, itu anggaran ada di sana, yang tidak bahagia lagi struktur organisasi daripada Kementerian Agama, karena sudah keluar perpresnya. Nah ini masalah pertanggungjawaban nanti keuangan, Pak. Jadi kewenangan itu diikuti oleh pertanggungjawaban keuangan.

Nah kita di Komisi VIII harus mendudukkan ini, Pak. Kalau kita setuju ini nanti ada perusahaan hukum, kita terlibat. Jadi ini betul-betul didudukkan masalah kewenangan ini, organisasi ini, supaya nanti di dalam pertanggungjawab penyelenggara haji ini, siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Apakah BPH atau Kementerian Agama?

Nah ini terus terang saja, Pak. Melepaskan BPH ini dari Kementerian Agama sangat berat, tidak semudah BWI *loss*, ya kan, masalah wakaf, apa namanya, Basnas *loss*, produk halal *loss*, tapi kok masalah haji ini. Ini Kementerian Agama ini agak berat gitu loh, ada apa gitu? Nah ini, ini persoalannya.

Nah oleh sebab itu, kami dari Fraksi Demokrat, ini Pak, dudukkan, Pak, karena kita masih memakai Undang-Undang 19 Tahun 2018, ngacunya ke sana. Sementara Perpres mengatur ini 154 dan 152. Sistematis dari undang-undang lebih tinggi, undang-undang daripada Perpres. Nah ini kami kira perlu ketegasan kita, apakah untuk tahun 2025 ini *full* dilaksanakan oleh Kementerian Agama atau oleh BPH? *Nggak* bisa dua-dua, Pak, Badan ini. Secara kewenangan *nggak* bisa Pak, menurut pengalaman kami gitu lho. Nah ini yang pertama masalah penyelenggaraan haji.

Kemudian dengan Babe Haikal, kami salut ya luar biasa Pak, ya. Babe luar biasa semangatnya. Cuman kami ingin bertanya Pak, armada kekuatan SDM Bapak untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat, pusat halal dunia itu seperti apa? SDM-nya seperti apa? Apalagi dikaitkan dengan strukturisasi. Mungkin perpanjangan tangan Pak Haikal untuk Provinsi, Kabupaten, Kota mungkin belum. Sedangkan barang yang akan diolah ini ada di Kabupaten, Kota, Pak, tidak di pusat, Pak. Yang punya rakyat itu Bupati, Walikota, bukan Presiden, bukan Gubernur. Nah oleh sebab itu, seperti apa nanti. ini SDM Kabupaten/Kota-nya, Provinsinya, karena ini yang menyelenggarakan nanti, sedangkan Bapak ada kebijakan, gitu lho.

Jadi ini tidak kami baca tadi, tidak ada penjelasan SDM disitu berapa

personilnya, bagaimana strukturnya. Nah ini mungkin perlu penjelasan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produk halal dunia, ini luar biasa. Sementara itu saja kami, terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya, terima kasih, Pak.

**ANGGOTA KOMISI VIII (.....):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak, belakang dulu ya, Abdul Fikri.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati  
Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Kepala dan Wakil Kepala BP Haji, dan juga  
yang terkenal Babe Haikal, BPHJP,**

Badan Halal, gitu saja.

Langsung saja ini Pak Ketua, tadi saya merespon pertanyaan Pak Ketua, jadi nampaknya ini memang sensitif ya, karena ini mekanisme pembahasan anggaran. Kirain tadi hanya menyampaikan bahwa *firm* yang sudah ditentukan di Komisi VIII sebelumnya itu, karena sudah jadi undang-undang. Itu sudah *fix* menjadi program-program yang sudah masuk dalam Kementerian Agama, maupun Badan baru, baik produk halal maupun juga Badan Penyelenggara Haji.

Tapi faktanya, beliau-beliau mengajukan usulan tambahan. Nah ini kalau begini kan berarti harus lapor ke Pimpinan DPR ini untuk apa perubahan. Jangan-jangan juga di, di kementerian lain juga begitu. Kalau memang begitu fenomenanya ya kita laporkan saja untuk kemudian berarti ada pembahasan perubahan anggaran, perubahan APBN, secara keseluruhan gitu. Karena ini penyelenggaraan haji 129 menjadi 356, tambahannya 226. Kemudian tadi Badan Halal dari 436 menjadi 1 triliun, 1 triliun 20 miliar. Nah ini kan tinggi sekali. Tadi Pak Ketua menyampaikan, nanti disalahkan ini, ya memang ini bukan forumnya.

Nah sehingga menurut saya, kalau memang medesak dan memang harus, harus diadakan, nah ini kan harus, tadi kan kita hanya mendengar

*Trilateral Meeting* atau pendekatan ke kementerian-kementerian lain. Tapi kan kita *enggak* tau *fix*-nya kan harus ada bukti semua, bahwa ini adalah ajuan memang dari pemerintah. Jadi sudah *enggak* boleh ada sektoral, tetapi semua bersama-sama, sehingga saya kira mungkin Komisi VIII bisa melaporkan saja ke Pimpinan DPR untuk kemudian ada APBN perubahan berarti, APBN perubahan. Saya kira itu yang prinsip, karena ini tugas dari Komisi VIII ini, kalau *enggak* nanti kita keliru tadi.

Kemudian yang lain tentang Badan, tadi Pak Achmad menyampaikan, saya kira memang ini haruslah sejak awal Komisi VIII mempertanyakan. Ini andaikan ada transisi, itu SOTK Dirjen PHU misalnya, menuju ke Badan Penyelenggara Haji, itu seperti apa? Kemudian nanti berikute apa namanya, diikuti dengan anggaran misalnya begitu. Ini mesti jelas, kalau *enggak*, pokoknya yang sekarang Kementerian Agama, nanti 2026 BPH misalnya seperti itu. Andaikan ada kesepakatan itu, maka dokumennya harus jelas, kemudian nanti SOTK-nya juga harus jelas. SOTK yang ada di Dirjen PHU, itu sekarang ini sebagai apa, XOVCO misalnya? Atau tadi Deputi-Deputi, Dirjen, apa, Direktur-Direktur masuk-masuk sementara atau seperti apa? Personalnya seperti apa mesti ditayangkan di sini, kalau *enggak* ya kita *enggak* jelas ini, siapa sesungguhnya. Kita nanti kalau diminta pertanggungjawaban, termasuk nanti yang dampaknya adalah anggaran, saya kira apa tidak jelas.

Terakhir, Babe Haikal ini. Sebelumnya kan ada yang heboh itu produk-produk yang judulnya bertentangan dengan syariat tetapi menjadi halal, kemudian kan diklarifikasi. Tapi nampaknya ini bukan hanya sekedar klarifikasi. Tapi harus penataan tadi, tadi apalagi produk halal dunia, ini lebih berat lagi kalau di dalam saja undang-undangnya saja ada undang-undang jaminan produk halal, kemudian sekarang ada masuk juga undang-undang ciptaker. Undang-undang Ciptaker, yang kemudian lembaganya juga, lembaganya tidak hanya lembaga apa, BP, namanya apa sih?

BPJPH, kemudian ada MUI, juga kemudian ada lembaga-lembaga lain yang ini mesti penataan, karena ada departemen lain juga, dewan perdagangan juga misalnya, itu kan juga terlibat. Nampaknya perlu keseriusan, terutama model koordinasi dan apa namanya. Nanti untuk supaya seperti janji dari Undang-Undang Ciptaker kan dari berapa, dari 97 hari menjadi 21 hari, dari 21 hari itu seperti apa? ini nampaknya harus dijelaskan, karena tadi banyak mempertanyakan ini jangankan apa, halal dunia. Di sini saja ini sulit, tadi sudah Babe Haikal sendiri menyampaikan bahwa sudah lama, sudah mengajukan tapi *nggak* keluar-keluar. juga sertifikat halal.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik, kanan lagi ya. Tapi kita agak fokus ya kalau kita mau bicara, saya kira kalau program nanti kita buka di persidangan berikutnya, yang perlu kita setuju itu adalah pengalokasian anggaran terlebih dahulu. Cuma karena ada

*problem* sedikit antara Badan Penyelenggara Haji karena tugas-tugas. Perlu pandangan dari kita juga. Kalau kita membahas landasan, sudah lewat, walaupun landasannya Undang-Undang 18 2019, kemudian ada perpres 152-154. Kita kalau mengurai itu lagi tidak mungkin. Kita mengikuti saja langkah pemerintah, yaitu koordinasi dengan sesama ya tripartit lah yang tadi menyebutkan. Pada akhirnya ada MOU tadi, cuma MOU-nya disampaikan dulu ke Komisi VIII, langkah-langkah apa saja.

Kemudian yang saya sebutkan tadi itu, kalau anggaran yang disebutkan di Badan Penyelenggara Haji ini adalah bagian dari MOU itu sendiri, itu mungkin bisa selesai, tapi kemudian ketika haji selesai 2025, masuk persiapan berikutnya, uangnya apa? *Nggak* disebut di sini. Nah, ini, ini sebetulnya pandangan kita bagaimana. Saya kira itu ya, Pak Hapya, ya.

Pak Hasan Basri Agus, silakan.

**F-P. GOLKAR (H. HASAN BASRI AGUS):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak Pimpinan, para Anggota Dewan yang kami hormati,  
Bapak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan,  
Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi Bapak Ketua, awalnya Bapak Presiden mengumumkan pembentukan BPH, kami berpikir Dirjen Haji ini bubar. Artinya penyelenggara haji ini Pak Menteri hanya pengawasan mungkin, dalam pikiran kami awal gitu. Tapi dengan keluarnya perpres yang 152, *eh* berapa ya?

152.

Di situ ternyata, BPH ini hanya mendukung, Pak Menteri untuk penyelenggara haji. Itu sebabnya saya lihat di 152, Dirjen Haji itu masih ada, gitu. Jadi ada semacam itu ya, kembar untuk penyelenggara haji. Tadi kami pikir ya sudah, berarti Pak Dirjen bubar, bahkan di daerah sudah telepon kami Pak, kami izin tolong direkomendasi untuk lari ke BPH itu, itu awal tadi kami berpikir.

Nah itu dalam Pasal 2, maksud saya bab 2 pasal 3 itu disebutkan disitu, bahwa BPH itu mendukung penyelenggaraan haji gitu. Itu seolah-olah disitu yang agak, yang agak, itunya agak bertentangan. Makanya Pak Ketua, kami mendukung andai kata undang-undang ini keluar itu dijelaskan betul, duduk antara Badan Penyelenggaraan Haji dengan Ditjen Haji ini. Artinya Pak, andai kata memang Pak Menteri membagi uang dari Ditjen haji dibagi sekian persen untuk BPH, ini sifatnya ndukung gitu. Nah tinggal lagi dalam penyelenggarannya nanti itu dibagi, mana yang menjadi tugas BPH dan mana yang menjadi tugas Ditjen Haji. Saya lihat itu begitu posisinya antara Ditjen Haji dengan BPH kalau kita baca perpres yang ada, gitu. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, dari Pak Haikal tadi. Pak Ketua dibantu oleh Wakil Ketua Badan, Wakil Kepala Badan, ini seorang mantan Wakil Menteri, seorang Pak Haikal, orang yang kita lihat selama di TV. Kami begitu Bapak tadi mengatakan mau bicara di firyn dunia, wah ini luar biasa nanti ke depan. Ya, nama kita gitu, mudah-mudahan kami mendukung sepenuhnya, mudah-mudahan Bapak sukses.

Tapi untuk Bapak ketahui, bahwa tugas Bapak berat, Pak. Di lapangan selama ini yang bertugas untuk produk halal ini satgas, dipimpin oleh Staf Kanwil, itu Kabag TU-nya dan ada seorang kalau di daerah itu Jambi dan Sekretaris Satgas mungkin, itu selama itu seperti itu. Artinya ganti ke depan, Bapak harus betul-betul membuat struktur organisasi sampai ke bawah gitu, artinya Bapak terpisah gitu dengan yang selama ini berbentuk satgas gitu. Itu satu.

Yang kedua, yang penting target Pak, kalau tidak salah target yang dulu itu sampai 30 ribu, tapi tidak tercapai. Kenapa? Alasannya pada saat itu, temen-temen di Menteri Agama yang lama, karena masih dalam berbentuk Satgas dan anggaran juga tidak, tidak begitu memadai gitu. Jadi oleh sebab itu, harus jelas kedudukan struktur organisasi sampai ke bawah. Apakah bentuk Badan, apakah itu apa namanya, kami tidak tahu nanti itu sesuai dengan yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan badan ya, badan apa namanya, ditingkatkan begitu.

Itu yang kami lihat, di sisi lain target-target harus ditetapkan, Pak. Dan terus terang produk dari luar sekarang luar biasa. Dan yang paling penting, Bapak MOU dengan dengan POM, Kesehatan, sebab kita tau ini halal atau tidak halal kan POM yang nguji, ini halal atau tidak halal. Nah saya tidak tau, apakah sudah ada koordinasi MOU atau tidak ini.

Itu yang masukkan dari kami, Pak Pimpinan, yang mungkin jadi perhatian kita. Saya pikir kalau kaitan dengan anggaran tadi Pak Ketua, kalau dengan letak kedudukan BPH itu hanya sekedar pendukung, saya pikir nggak jadi masalah.

Demikian, terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik, terima kasih.

Kita kembali lagi sebelahnya, ya Kyai Maman.

**F-PKB (K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Ketua dan seluruh Pimpinan Komisi VIII dan Anggota.

**Yang saya hormati Pak Menteri Agama dengan Pak Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji beserta Wakil,**

**Kepala Badan Halal.  
Bapak/Ibu sekalian,**

Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa di forum ini tidak ada pembahasan tentang pembahasan tambahan, tambahan anggaran. Kita harus memastikan anggaran yang hari ini akan kita setuju itu betul-betul sesuai dengan filosofi anggaran.

Makanya poin kedua yang ingin saya katakan, bahwa anggaran-anggaran yang kita lihat, bahwa pas sedetail seperti ini, itu harus ditekankan jangan sekali-kali ini menjadi proyek, tapi program. Karena di beberapa titik anggaran yang perlu... Saya senang Pak Menteri mulai tegas, misalnya soal gratifikasi dan lain sebagainya, tetapi tegaskan bahwa Kementerian Agama ini bukan tempat nyari proyek, tetapi betul-betul melaksanakan seluruh program.

Nah yang ketiga, menurut saya yang mendesak bagi kita Komisi VIII ini ada revisi undang-undang. Apa yang dikatakan Pak Achmad, Pak Basri barusan itu, tumpang tindih lembaga baru Badan Haji ini itu akan terus-menerus terjadi dan kalau kita lihat anggarannya, itu betul-betul *double* anggaran. Ini yang *nggak* boleh terjadi.

Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral, Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan, baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan keagamaan, perpustakaan, masjid, dan terutama para Dai. Saya tadi di media mengatakan, bahwa sertifikasi Dai itu menjadi sangat *urgent* hari ini. Jangan sampai ada seorang Dai melakukan apa namanya, penghinaan terhadap seorang tukang es teh dan lain sebagainya, termasuk juga kita disuguhi oleh para Dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan, berbasis referensi Quran, Hadis atau nilai-nilai klasik seperti itu.

Jadi ini tolong agak serius, seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak, jangan mengulang kesalahan orde baru yang membuat itu menjadi induktorisasi, mendoktrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi *nggak* suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi, bahwa *ummata wa satta'ita kunu syuhalannas wa yakuna rosul alaikum syahida* itu menjadi penting. Jadi, poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kek apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah apa, media sosial seperti ini.

Oleh sebab itu, sekali lagi saya menginginkan anggaran ini disetujui, bahwa nanti di tengah jalan ada sebenarnya forum untuk tambahan atau revisi anggaran, tetapi persoalannya apakah seluruh filosofi anggaran ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia, dan lain sebagainya, sehingga ini semua bisa tercapai.

Itu saja Bapak, saya ingin sahabat saya ini Babe Haikal dan sebagainya, sulit Pak ngatur yang namanya qiblat halal di kita itu. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek orang tiba-tiba sertifikasi halal, sertifikasi halal, padahal

tidak halal semua. Prosesnya itu yang sulit, seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.  
Pak Husni dulu ya.  
Silakan, Pak Husni.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sebelum Pak Husni lanjut, kita perpanjang dulu.  
Jadi 22, pukul 22.00.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan jajaran, teman-teman Komisi VIII,  
Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama,  
Yang saya hormati Ketua Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji,  
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Halal, Babe Haikal, Wakil Kepala Badan Halal,**

Kita mulai dari Babe Haikal dulu ya. *Nggak* gampang, Babe, ya. Saya lihat semangatnya luar biasa tadi. Ingin menjadikan Republik Indonesia adalah pusat halal dunia. Luar biasa, sangat luar biasa, tapi *nggak* gampang itu Babe Haikal.

Kemarin sudah dikeluarkan 1.200.000 ya untuk para pengusaha.  
Yang akan datang.

Pertanyaannya, itu untuk pengusaha apa jenis barang yang dihalalkan? Pisang goreng kering, pisang goreng keju, lain-lain ya, pisang goreng nanas, tak hapal lagi ya, itu baru urusan pisang goreng, belum lagi ubi dan lain sebagainya. Kemarin malah kan Menteri Agama yang lalu menetapkan itu Oktober 2024 semua harus menjadi barang halal. Saya sempat di Komisi VI

yang lalu, Babe Haikal ya, lebih akrab kayaknya ya. Mereka, Kementerian Koperasi tidak sanggup untuk penyelesaian masalah jaminan produk halal tersebut. Malah mereka minta 2026, dan untuk saya rasa, untuk mencapai apa yang Babe harapkan tentunya harus mempunyai infrastruktur yang sangat kuat sekali sampai ke bawah.

Ada puluhan ribu, ya hari ini, ada puluhan ribu barang-barang dari negeri China yang ingin men-sertifikat halal di republik kita. Yang paling terdekat negara Singapura, ya Singapura juga ada puluhan ribu yang akan mendaftarkan produk-produk halalnya. Tadi Babe Haikal bercerita, bahwa ada beberapa ratus malah apa rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Kami kemarin Babe, pergi ke New Zealand, yang dulunya kita dengan mudah ya barang-barang di New Zealand yang kita sewaktu itu juga lihat bahwa itu sudah dilaksanakan secara syariat ya. Kalau kita lihat saat itu memenuhi tentang sertifikat, apa produknya halal, tapi pada tahun 2024 ya pertengahan itu dihentikan.

Kita gak tau apa permasalahannya ya. Dihentikan tidak bisa, tidak gampang untuk masuk Republik Indonesia. Jadi, tentunya dalam hal ini antara produk dalam negeri, ada produk luar negeri, mestinya ada sebuah standarisasi di dalam masalah penyelembihan penyembelihan tentang hewan-hewan tersebut, ya, jadi yang kita lihat, negara yang begitu maju, yang hampir seluruh dunia dia kirimkan dagingnya, *tapi* di Indonesia belum tentu bisa masuk. Ini sangat luar biasa.

Kemudian, yang masalah sanksi-sanksi tadi ya, ya jadi. Jangan nanti kita tadi kan dikatakan ada 14 juta UMKM yang berurusan dengan makanan saja. Ada 66 juta UMKM, dan sebagian besar mereka masih buta masalah produk halal. Jangan sampai nanti ya kita menetapkan aturan dan peraturan, tukang jual pisang goreng di pinggir jalan pun harus ketangkap gara-gara tidak bisa mengurus sertifikat halal.

Kemudian, untuk Pak Menteri Agama dan juga sekalian yang tadi dari Badan Anggaran Haji, juga, apa, Badan Halal, saya di Banggar, Pak, Badan Anggaran. Kemarin kita rapat Banggar itu dengan hampir seluruh Menko-Menko. Semuanya minta penambahan Anggaran. Tidak ada ketok palu bahwa itu nanti tiga bulan ke depan baru bisa dibahas. Jadi, kepada para bapak-bapak yang meminta tambahan anggaran, kita simpan dulu. Kita simpan dulu karena itu tidak *anu* ya, di 2025 akan dibahas.

Kemudian, kepada Badan Penyelenggara Haji, saya pikir ini ada sinkronisasi lah dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU, supaya pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini bisa dapat berjalan baik dan lancar.

Cuma ada sedikit ini, Pak Ketua. Ini kan badan yang ada sehari ini dengan kementerian ini kan sejajar. Apakah boleh Kementerian Agama mengalokasikan dananya? Yang tadi kita lihat, bahwa ada yang untuk Badan Penyelenggara Haji 129 miliar dan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ada 436 miliar. Karena ini suatu hal yang baru sebetulnya untuk kita.

Saya rasa itu saja ya yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya akhiri.

*Wabilahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Wa'alaikumussalam.*

Ya, itu Pasal 51 Undang-Undang APBN ini tuh Pak Husni, karena memang ada pembelahan. Jadi, harus kita setuju di sini pengalokasiannya.

Silakan Bu Seli.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Ya, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Menteri Agama, Pak Wamen, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala BPJPH beserta jajaran.**

Saya dari tadi belum bisa ketawa, *speechless* mendengarkan paparan Bapak-Bapak semua. Antara takut untuk mengungkapkan dan takut salah, karena yang dibicarakan adalah dana umat. Kalau sudah berbicara dana umat, maka keputusan DPR ini mengikat. Komisi VIII pun bertanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan itu semua.

Dari yang disampaikan Pak Menteri, kemudian yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VIII, Pasal 51 mengikat, dan hanya satu kali kita menyetujui itu, tidak berkali-kali. Artinya, kalau cuma satu kali, apa yang diajukan oleh Bapak-Bapak dan disepakati malam hari ini, itu adalah keputusan mengikat dan kita mau tidak mau harus menggunakan anggaran yang sudah disepakati itu.

Saya ikuti semua yang Bapak paparkan, termasuk dari Pak Menteri maupun dari Kepala Badan. Dan saya sempat terhenyak dari yang dipaparkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama agak berbeda. Mungkin Pak Menteri Agama tidak terlalu paham secara detail, karena yang menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji ini adalah Dirjen Haji secara teknis. Sementara Badan Penyelenggara Haji sudah mulai mempelajari, karena memang dia sudah diberikan mandat, sesuai dengan Perpres, dan sudah melakukan koordinasi berkali-kali.

Yang terakhir menarik buat saya, dan mungkin rekan-rekan juga harus melihat di halaman lima, di halaman lima dijelaskan bahwa sesuai dengan aturan Perpres Nomor 154, Badan Haji ini juga sudah melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai SOTK, kemudian mengenai keuangan yang memang disepakati usulan tambahan. Artinya, mengenai rancangan apa yang harus dikerjakan, Tupoksinya bagaimana, dan ke depan harus seperti apa dalam penyelenggaraan masa transisi dari Dirjen PHU menuju ke Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Itu harus segera dilaksanakan, terkait dengan apa yang sudah disepakati oleh DPR Komisi VIII tentang perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dan di situ jelas apa yang diinginkan oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Uang penambahan itu juga menyangkut dengan kebutuhan Biro Keuangan, menyangkut dengan hukum, menyangkut dengan pelaksanaan penyelenggaraan untuk pembuatan undang-undang. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk yang lain-lain, *gitu loh*. Artinya menurut saya, ini harus didiskusikan antara Kementerian Agama, terutama Dirjen PHU dengan Badan Penyelenggara Haji.

Anggaran mana yang bisa diserahkan kepada Badan Penyelenggara Haji, jangan *ewuh pake ewuh*. Ini untuk umat. Kalau seperti ini terus, gak akan jalan pelaksanaan ibadah haji. Mau sampai kapan? Kalau ekstremnya menurut saya, ke depan mungkin yang namanya BPKH dengan BPH bisa digabung.

Masa urusan umat saja kita harus seperti ini. Pak Menteri, mohon maaf, ada Direktorat Dalam Negeri, uangnya juga buat apa sih? Waktu tinggal sedikit kok. Kalau kita berbicara, mohon maaf nih Pak Dirjen, kalau kita bicara soal manasik haji untuk para jamaah haji, waktunya sudah mepet, kita belum ketuk palu. Ada berapa kali kita manasik haji untuk para jamaah? Delapan kali dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tingkat kecamatan. Itu nggak akan kepaके. Lebih baik kita efisiensi, kita kasihkan kepada Badan Penyelenggara Haji yang menurut saya itu akan lebih efektif.

Kenapa sih harus ada ego sektoral antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji, *gitu loh*? Toh semuanya juga untuk umat. Mohon maaf, saya agak emosional dari tadi karena menurut saya ini buat umat, untuk jamaah, agar masa transisi ini bisa diselesaikan dengan baik. Waktu kita nggak lama. Sebentar lagi DPR akan reses. Besok kita reses loh, nggak ada waktu, Pimpinan. Ini jelas kok disini sudah diketahui oleh Bappenas, sudah diketahui oleh Kementerian Keuangan, tinggal Menteri Agama menyetujui atau tidak. Saya yakin Menteri Agama tidak tahu. Yang tahu itu adalah Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, *gitu loh*.

Saya tidak akan berbelit-belit, Pak Pimpinan. Bagaimanapun juga, kalau saya harus ungkapkan, saya juga punya catatan dari Kementerian Agama. Mungkin Pak Menteri juga harus tahu bagaimana catatan dari BPK terkait dengan temuan. Tantangan dan peluang perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji di tahun 2023. Masih adanya kompleksitas pengelolaan keuangan haji dan operasional ibadah haji, ini harus dilakukan perbaikan di Kementerian Agama, terutama tentang efisiensi anggaran penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp571 miliar. Artinya, apakah penundaan laporan tersebut bersifat administrasi atau terkait dengan tata kelola yang belum teratasi? Buat saya, sistem pengendalian internal (SPI) yang ada di Kementerian Agama ini seperti apa, *gitu* kan? Jangan sampai mengganggu roda yang ada di Kementerian Agama, *gitu* loh.

Nah, ini catatan-catatan saya. Menurut saya, akan bermasalah, akan menjadi bola liar, dan menjadi sistemik terkait dengan tata kelola keuangan dan bagaimana mitigasi ke depannya oleh Kementerian Agama, *gitu*. Jangan sampai kejadian ini berulang dan mudah-mudahan, Pimpinan, saya tidak akan membahas yang lain-lain. Kalau kaitan dengan BPJPH, saya yakin BPJPH punya *master plan* yang bagus. Tadi ada 10 rencana strategis yang mudah-mudahan kita bisa *support* ke depannya, *gitu* kan. Tetapi kalau menyangkut umat, menyangkut dengan jamaah, masih banyak, ada 5,4 juta jamaah yang menunggu kebijakan. Dan kita sudah telat untuk menentukan BPIH dan BPIH untuk jamaah. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Wa'alaikumsalam.*

Ini ternyata waktu yang kita pakai baru satu orang itu melebihi 15 menit. Bagaimana kalau kita menyepakati? Pertama, malam ini yang kita butuhkan adalah mengetok alokasi anggaran. Tetapi karena anggaran ini ada pertanyaan besar, baik Pimpinan dan Anggota butuh penjelasan. Kalau tidak butuh penjelasan, oke, sudah. Kami sudah rida, setuju, ya kita ketok. *Tapi* kalau tidak setuju, bagaimana kalau kami skors waktu ini untuk berunding pemerintah? Karena apa yang disebutkan oleh Ibu Shelly tadi, kami sekarang mulai gugup, Pak Menteri. Sama dengan Pak Menteri gugupnya. Kami menunggu usulan pemerintah tentang BPIH. Sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu. Yang dulu itu kami nggak setuju karena tidak menyebut badan. Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, segera usulkan lagi.

Tadi Pak Wahid bisik-bisik ke saya, "Habis ini lanjut nggak usulan BPIH?" Saya bilang, suratnya belum ada, usulannya belum ada. Mestinya berdasarkan MOU, berdasarkan MOU itu maka diusulkan secara bersama-

sama. Kami sedang menunggu ini. Bahkan kami sudah meminta izin ke Pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses. Itu saking seriusnya kami. *Tapi* kalau nggak ada kesepakatan di pemerintah, ya kami akan umumkan juga. Jangan disebut Komisi VIII salahnya. Jangan disebut-sebut Komisi VIII, karena kami sudah mulai di nilai orang. Kasih apa namanya Komisi Haji, siapa yang membentuk Komisi Haji, gak tahu, Komnas Haji menyebut dirinya Komnas Haji, sendiri dia, dia sendiri stempel-stempel dia, KOP surat nya dia, semuanya dia Komnas Haji dia, menyalahkan Komisi VIII tidak mensahkan tentang penyelenggaraan haji 2025. Padahal usulan gak ada.

Ini saya kira bukan saatnya kita bicara program. Kita bicara saatnya alokasi anggaran. Kalau tidak ada, harus minta waktu penetapan lagi di masa reses. Kalau menunggu selesai reses, nanti tanggal 22 Januari baru ada waktu. Karena itu, kami minta persetujuan dari para anggota dan pimpinan. Malam ini kita bukan membahas program. Nanti akan kita tanya lagi, mau BPH mau BPJPH, kita akan tanya programnya, belum tentu kita setuju itu, kalau pun yang 10, Pak BPJPH walaupun bagus belum tentu kita akan sabet semua. Ada hal-hal lain yang perlu penajaman.

Apalagi di Badan Haji, ya, Badan Haji kita, itu tadi pertanyaannya. Kalau anggaran yang dibahas ini adalah pelaksanaan haji 2025, cukup dan memadai, ayo kita sahkan. *Tapi* setelah pelaporan haji dan langsung persiapan haji, itu ada paling tidak tiga bulan. Anggarannya apa? Besok disalahkan Komisi VIII, kami tidak mau, Pak Menteri. Komisi VIII disalahkan. Sudah kita ketok, anggarannya tidak ada, nggak bisa. *Nah*, ini yang disebutkan oleh Bu Selly tadi itu. Kami nggak mau disalahkan. Ini urusan umat.

Tentu saya kira Pak Menteri yang tahu. Mungkin Dirjen Haji yang membuat alokasi ini. Mungkin Pak Menteri nggak paham. Bagaimana?

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Silakan, Pak Wachid.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Terima kasih, Pimpinan, dan,

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota, juga serta Pak Menteri Agama, Pak Wakil, dan Badan Haji dan Wakil, serta juga para BPJPH dan Wakil,**

Pak Menteri, kami terus terang, malam ini saya gelisah persiapan haji tahun 2025. Ya, ini Pak Menteri sebagai Menteri yang baru, badan baru, ini harusnya Pak Dirjen yang menjelaskan. Siklus Arab Saudi jalan terus. Malam ini, Pak Menteri, saya tadi bisik-bisik dan saya tanya ke belakang ke SETKOM, ada nggak surat permintaan hari ini untuk Menteri Haji membahas masalah BPIH? Dan kalau ada, kita malam ini rapat maraton sekalian, kita putuskan bikin panja. Kami sudah bikin surat ke pimpinan DPR untuk dilaksanakan Panja Haji di saat reses. Ini satu kepedulian kami di Komisi VIII, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Badan. Jadi kalau betul sampaikan oleh Pimpinan, kita tidak menyampaikan masalah perincian. Kalau memang Badan sudah setuju, oke kita ketok. Tapi mana surat dari Pak Menteri minta untuk pengajuan BPIH tahun 2025, sehingga kami ada dasarnya untuk malam ini melanjutkan ya untuk bikin rapat Panja Haji 2025. Ini nggak ada. Padahal besok pagi kita sudah penutupan masa sidang, dan saya sudah bicara pada pimpinan tadi pagi, seperti tadi malam sebelum, tadi ini sebelum rapat. Ada nggak ini? Suratnya ada nggak? Nggak ada. Terus kita ada rapat, boleh nggak bikin rapat? Kalau yang setuju ya adalah Panja, tapi sampai malam ini kementerian belum ngajukan BPIH. BPIH yang kemarin itu kami belum setuju karena badan belum dilibatkan.

Saya tadi nyampaikan kepada Pak Pimpinan bahwa kami ini disorot oleh Komnas Haji. Banyak LSM yang mengatakan ini jangan-jangan DPR ini yang disalahkan nanti. Pak, ini tanggal 13, sudah 13 Januari. Besok sudah ada biokontes, sudah ada kontrak-kontrak, Pak, di Arab Saudi, Pak, hari ini sampai tanggal 13 Januari, Pak Dirjen harus menyiapkan benar yang namanya armusnah. Itu yang kita pakai yang mana? Berapa biayanya? Saya sudah sampaikan kepada Pak Pimpinan bahwa kalau sampai Panja belum selesai, kalau itu kontrak harus dilakukan dan berapa harga anggarannya, kita izinkan Pak untuk mengeluarkan uang BPKH. Itu, Pak Dirjen, ya. Jadi tolong malam ini kalau bisa ini dituntaskan para anggota. Ya kita tuntaskan. Kalau sampai subuh kita lakukan. Itu lho. Jadi, ngejar ini, Pak Menteri. Begitu, Pimpinan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, arahnya ke sini ya, Pak Abidin Pikri. Kalau kita melebar lagi nanti nggak siap-siap.

Ya, silakan, Pak Abidin.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan,

**Yang saya hormati Ketua Komisi VIII dan para Wakil Ketua,  
Yang saya hormati anggota Komisi VIII, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri,  
para Badan Halal dan Wakil, kemudian Kepala Badan Haji, Kementerian  
Agama bersetajajaran.**

Saya mau pelan-pelan ini. Kalau bisa ditayangkan halaman 14 bagian dari Kementerian Agama. Monto tolong halaman 14, saya mau pelan-pelan aja. Bisa, Mas, dibantu. Semua bisa kita selesaikan dengan hati tenang. Memang harus pelan-pelan ini, biar apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2025 Pasal 51. Halaman 14, Tabel 6, Perubahan dan Penyesuaian Alokasi Anggaran Tahun 2025 Kementerian Agama setelah restrukturisasi berdasarkan unit Eselon-1. Total keseluruhannya dari semula Rp79.168.712.137.000 menjadi Rp78.802.159.164.000. Bisa, Mas? Biar kita lihat pelan-pelan, halaman 14 bahan yang ini, Kementerian Agama. Ya, Tabel 6 yang ini. Bisa, Mas? Ada nggak ini? Kita baca di sini lah ya, biar ini.

Soal untuk badan penyelenggara jaminan produk halal itu sudah masuk dengan sendirinya. Sesuai dengan anggaran yang disetujui, nah ini dia tuh. Semua kan dong, masuk. Nah, kenapa badan ini langsung bisa? Karena memang Pasal 51 Undang-Undang APBN menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kementerian atau lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian atau lembaga yang baru dibentuk pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian atau lembaga dimaksud, ya, di Komisi VIII.

Jelas, *clear*. Babe Haikal senyum. Hebat senyum. Wakil Badan Halal oke, selesai. *Nah*, untuk di Badan Haji, kalau dilihat dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh itu yang tadinya 1.565 menjadi 1.435.297.993 dikurangi 1.297.399.976. Itulah untuk badan penyelenggara haji. Lihat ya.

Kemudian ada bahan ini dari BPIH. Mintanya berapa? 356.644.194.000 *Nah*, itulah yang harus dirembuk sama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bukan minta tambahan ke kita, karena tidak ada kewenangan untuk menampung tambah. Kita hanya mempunyai kewenangan mengalokasikan, merelokasi. Nah, ini yang kita tadi panjang lebar. Karena apa? Kalau 129 ini untuk ke depan sudah tidak ada lagi, apa yang mau dikerjakan untuk tahun 2024 Agustus sudah ini. Jadi, Pimpinan, saya usul: Diskors, rembukanlah badan penyelenggara haji dengan Kementerian Agama. Kalau sudah lah selesai, ya kita putuskan, Pak Ketua. *Tapi* kita jangan disalahkan, karena nggak bisa bergerak tuh badan penyelenggara haji itu. Nah, ini yang harus dikelilingi.

Saya kira itu, Pak Menteri, Pak Kepala Badan Haji, dan Pimpinan dan anggota sekalian. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik, kami tidak perpanjang lagi dengan para anggota, mohon pengertiannya. Kami yakin bahwa pendapat dari para anggota masih ingin menyampaikan, tetapi yang kita butuhkan itu adalah sebetulnya pihak mitra kita. Karena itu, kita beri kesempatan sampai jam 22.00 untuk berunding, menyepakati lah. Tapi kalau aman, jangan pergi. Nanti nggak disahkan anggarannya. Tunggu, walaupun sampai jam 4 subuh, tunggu. Solidaritasnya begitu.

Sidang kami skor.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 21:32 WIB)**

**(SKORS DICABUT PUKUL 22.27 WIB)**

Waktu skor tadi, persidangan kita menyerahkan ke pemerintah untuk melakukan kesepakatan, merundingkan, mengalokasikan anggaran dari pagu yang sudah ada, bukan dari yang akan ada. Dari yang ada itu, menurut Komisi VIII tadi, mungkin saja menjadi problem kalau tidak kita siapkan lebih awal. Kami yakin dan berkeyakinan, para anggota ini percaya pemerintah bisa melakukan perundingan dan mengalokasikan dengan baik. Karena itu, kami tetap menunggu terus. Begitu kami dilihat bubar dan keadaan senyum-senyum, *alhamdulillah*, sepertinya sudah menemukan jalan. *Nah*, karena itu, kami persilakan Pak Menteri menyampaikan hasil perundingan. Kalau diperlukan tambahan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji, nanti ditambahin.

Kami persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sebelum Bapak memulai, karena waktu kita sudah lewat setengah jam, maka kita tambah lagi 30 menit lagi.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Baik, Pak. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Dirjen Haji untuk mencoba menarasikan apa tadi yang menjadi kesepakatan kita. Silakan, Pak.

**DIRJEN PHU (Prof. H. HILMAN LATIEF, M.A., Ph.D.):**

Baik, terima kasih.

**Pak Menteri yang saya hormati, Ketua Pimpinan dan para anggota yang kami muliakan, teman-teman semua, Pak Menteri, juga Bapak Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Bapak Wakil Menteri.**

Tadi kami mendiskusikan terkait dengan pembiayaan atau alokasi anggaran yang akan diputuskan pada hari ini. Memang, Bapak, semangatnya itu dari kedua-duanya adalah tambahan. Tetapi kami tahu bahwa di dalam forum ini bukan waktunya kita meminta tambahan. Perlu kami sampaikan bahwa 129 miliar alokasi untuk badan haji itu dirumuskan pada saat SOTK itu belum keluar, dan ini merupakan hasil dari *trilateral meeting* antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan biaya atau anggaran di PHU sendiri, itu juga sudah masuk di dalam capaian kinerja yang akan diukur di Bappenas. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan operasional untuk 2025, untuk penyelenggaraan haji yang secara mandat masih di Kementerian Agama, maka kita melihat bahwa untuk 129 miliar itu bisa ditetapkan. Akan tetapi, kedua lembaga ini sudah menyusun MOU yang akan disampaikan juga pada Komisi VIII. Di situ memang ada klausul juga tentang pembiayaan, Pak. Nah, ini mungkin jalan yang paling memungkinkan dalam proses kali ini. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, tetapi apapun yang menjadi klausul di pemerintah tentang pembiayaan itu harus disahkan di Komisi VIII. Forum itu tidak ada kemudian. Kami tidak akan mensahkan itu, karena nggak ada forum-nya. Forum-nya nunggu nanti pembahasan anggaran lagi. Mandat Pasal 51 Undang-Undang 64 ini, APBN kita 2024, hanya sekali ini saja. Begitu kita sahkan, ya sudah, titik, itu saja. Kalau badan oke, sudah kita sahkan.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTA, M.E.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ada yang bertambah? Ada?

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Iya, saya tambahkan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini absah ini dari Waka Badan ini absah?

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Izin, izin, izin, Pimpinan. Saya perkenankan menjelaskan beberapa hal. Pertama, kalau ditanya, izin. Iya, baik.

Pertama, kalau ditanya kepada BP Haji terkait dengan anggaran 129 miliar, tentu kami merasa kurang. Namun, terus terang, ketika kami diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala dan Wakil Kepala, pada prosesnya, proses penganggaran itu sudah terjadi. Kemudian muncul 129 miliar itu juga pada proses pemecahan institusi yang dari Kementerian Agama kemudian ada BP Haji. Akhirnya, penganggaran itu seperti, dalam tanda kutip, *given* kepada kami. Nah, kami tidak punya momentum tentu untuk mempersiapkan banyak hal, terutama terkait dengan SOTK. Karena ketika ini sudah ditetapkan, SOTK itu belum ditetapkan. Kemudian, ketika ditetapkan SOTK, barulah kemudian anggaran ini terasa tidak cukup. Makanya, kami tadi ada usulan tambahan. Namun, setelah kami berunding panjang sekali tadi, walaupun kami minta tambahan anggaran, dari mana? Itu jadi pertanyaan juga, kesulitan. Jadi, kami juga tidak tahu tambahan itu atau anggaran kalau kami naikkan, *sharing*-nya dari mana. Itu juga tidak kami temukan, apalagi ini sudah diputuskan melalui *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Di sisi lain, kalau kemudian kami menggeser anggaran dari PHU, juga terjadi kekurangan di PHU. Komitmen Kepala Badan dan saya tentu ingin memastikan penyelenggaraan haji 2025 atau 1446 ini sukses. Oleh sebab itu, tadi kami bersepakat anggaran Rp129 miliar ini yang kurang. Maka, kami akan meminta ada tambahan seperti pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada Januari nanti.

Asumsi kami, 129 miliar ini adalah anggaran sementara sampai dengan bulan Desember nanti. Januari,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak Wakil Badan, hak *budgeting* itu ada di DPR, harus disahkan, di DPR.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Betul, Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Mekanismenya tidak ada, *tapi* tidak apa-apa. Kalau badan sudah setuju seperti itu, ya apa ya kita perpanjang? Kita ketuk saja. *Tapi*, kami akan membuat satu klausul bahwa persiapan haji 2026 tidak dicantumkan anggarannya.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Nah, terkait dengan persiapan haji 2026 itu tadi kami sebutkan, tentu proses pembicaraan tambahan di Januari itu.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Januari kapan? Tidak ada Januari.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Ada MOU, Pak. Jadi MOU dengan Kemenag terkait dengan persiapan 2026-an.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Memangnya boleh geser-geser anggaran tidak diketahui DPR? Tidak boleh! Pelanggaran itu.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

MOU itulah yang nantinya tidak bisa ingin kami bicarakan dengan Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Jangankan antar lembaga, di dalam kementerian pindah dari satu diri ke diri lain harus diketok di sini. Apalagi pindah ke badan lain setingkat Menteri. Enggak bisa, enggak bisa, kami akan laporkan itu pelanggaran.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Terus terang, karena kondisinya seperti ini, terus terang,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Dibutuhkan kah untuk kembali menyampaikan ke pemerintah. Apakah itu ke Menpan RB atau ke mana, ya terserah. Apakah pada saat dulu membahas ini badan diikutkan?

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Kami belum diikutkan dalam proses ini.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, berarti kan ini laporan dari Kementerian Agama bahwa kebutuhan badan seperti ini.

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAKS.E., M.E.):**

Pak Sekjen yang mengikuti proses sejak awal sebelum kami masuk.

**SEKJEN KEMENAG RI (Prof. Dr. MUHAMMAD ALI RAMDHANI, S.TP, M.T):**

Terima kasih.

Tentu atas izin Pak Menteri, perlu saya sampaikan bahwa anggaran yang *eksisting* untuk tahun anggaran 2025 yang sejumlah Rp1,5 triliun itu pada dasarnya di dalamnya ada untuk SBSN dan lain sebagainya yang sifatnya kontraktual, dan itu anggarannya hampir Rp900 miliar. Kemudian, untuk penganggaran kebutuhan daerah di dalam penyelenggaraan ibadah haji, embarkasi, dan lain sebagainya itu Rp200 miliar. Untuk kebutuhan seluruh pusat, dari mulai perjalanan dinas persiapan luar negara dan lain sebagainya, pada Direktorat Jenderal PHU itu nilainya sebesar Rp301 miliar. Kebutuhan dari BP Haji itu Rp356 miliar. Hanya untuk memenuhi kebutuhan BP Haji dengan optimal, digeser pun tidak memungkinkan. Sementara tadi saya mendengar bahwa ada komitmen dari Pak Kepala dan Waka, penyelenggaraan ibadah haji ini harus optimal.

Dan kemudian, ditarik Rp129 pun ada kekurangan-kekurangan yang kemudian akan kita geser dari fungsi kerukunan agama pada sektor lain. Dan memang ini harus ada will, yang pada dasarnya kalau memenuhi Rp356 miliar saja yang diminta, itu tidak memungkinkan karena anggaran yang bisa digeser itu mentok di angka Rp301. Itu dengan asumsi bahwa semuanya dihabiskan, tidak ada penyiapan penyelenggaraan untuk 2025. Dan ini tentu membahayakan bagi penyelenggaraan ibadah haji.

Jadi, untuk sementara dengan perhitungan-perhitungan yang serba minus itu, Rp129 miliar adalah angka yang paling rasional menurut pandangan dari kami. Itu saja, Pak Marwan, Pak Ketua. Walaupun kurang, ini memang

kurang. Rp301 itu termasuk di dalamnya penyelenggaraan haji yang sekarang. Itu dikurangi Rp129, berarti tinggal Rp172-an miliar. Itu untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Berhasil kita menyelenggarakan haji 2025.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Berhasil kita menyelenggarakan haji 2025, *tapi* babak belur 2026. Sama saja kan?

**SEKJEN KEMENAG RI (Prof. Dr. MUHAMMAD ALI RAMDHANI, S.TP, M.T):**

Saya kira anggaran Rp129 miliar ini, izin tanpa bermaksud apapun, babak belur. Kalau ini habis, ini habis juga. Itu juga kayak sarung, ditarik ke atas, diturunin juga sama auratnya gitu. Jadi, solusinya memang pada hari ini kalau misalnya tidak disepakati, diblokir apalagi. Kesepakatan hari ini menjadi bagian penting dari proses penggunaan anggaran kita. Kalau tidak disepakati, ya diblokir. Apalagi diblokir, kemudian kita tidak bisa bergerak apa pun.

Jadi, solusi-solusi awalnya adalah seperti ini, dengan ikhtiar-ikhtiar melalui mekanisme-mekanisme yang tentu atas persetujuan Dewan, melalui BABUN atau apa pun. Itu mudah-mudahan semuanya dapat terselenggara dengan baik. Itu saja izin para pimpinan dan anggota Dewan yang mulia.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin Ketua,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Silakan Pak Abidin Fikri dulu.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Baiklah, ini satu poin yang mengkhawatirkan. Kalau DPR melalui Komisi VIII tidak menyetujui angka Rp356, itu berarti DPR akan di luar dimarahi oleh umat, karena pasti akan tidak beres badan penyelenggaraan haji. Itu satu.

Yang kedua, ini Kementerian Agama, itu kan banyak tuh yang minus-minus itu. Misalkan di Dirjen Pendidikan Islam, dari Rp36 menjadi Rp35, itu kan minus tuh. Nah, kita enggak tahu nih yang dikurangi yang mana, untuk apa saja tuh di tingkat program. Artinya, sebenarnya kewenangan DPR untuk memutuskan anggaran ini berdasarkan Pasal 51 ini saja. Nah, kalau kita disisir, misalkan Pak Menteri mengatakan ada efisiensi untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Berapa efisiensinya? Dimasukkan di mana efisiensi itu? Begitu lho, agar kita bisa memenuhi permintaan dari Badan Haji, Pak.

Ini sudah terbuka, Pak. Itu tertulis lho pengajuannya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kenapa tadi diskors oleh pimpinan untuk berembuk mana bagian yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan sesuai dengan yang semestinya. Badan, Tupoksi dari Badan Haji ini saja masih kurang, ini yang 356 ini. Betul, Pak Gus Irwan? Betul nggak? Itu masih kurang dari alokasi yang tadi katanya, apa, 1,5 jadi 1,4. Ini masih bisa disisir lagi untuk menambah di sini. Mentok-mentok 301, kan tadi, kan? Betul ya? 301 dari 29, 31. Ini untuk bagian yang disisir di Dirjen Binalangan Haji dan Umroh.

Bagaimana dengan yang lain, di Sekjen misalkan, di Dirjen Bimas Islam atau yang lainnya. Itu, Pak Menteri dan Pak Kepala Badan, itu sebenarnya ininya. Karena kita nggak bisa beranjak dari pasal 51 ini. Itu maksudnya. Nah, itu makanya diberi peluang oleh kita, oleh pimpinan tadi, untuk berembuk yang mana yang bisa. Nanti kalau kita debat lagi, bisa kita bongkar semua lho ini lho.

Apakah kita bisa? Bisa, karena APBN-nya sudah di bulan Agustus. Baca Undang-Undang MD3, kita bisa minta program, betul nggak? Kalau sudah lihat dalam saat pembahasan sebelum dikasih ketok, itu kita tidak memang gelondongan tuh semua tuh, karena dibatasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi setelah diketok, berapa hari, Pak, kita bisa minta? 30 hari, Pak. Nah, kalau kita mau periksa ini, waduh, Pak, ini rapat ini bisa, bisa nggak selesai-selesai ya, Pak.

Nah, maksud kami tadi, berembuklah, ya. Kementerian Agama sama Badan Haji, tolong diberembuklah. Kenapa? Karena jangan sampai nanti keluar Komisi VIII tidak menyetujui tambahan yang diminta oleh badan haji, *gitu*, Pak. Nah, kita nggak mau dipersalahkan karena ini urusan umat. Urusan ini yang sesuai dengan Perpres tadi, kan, Perpres 152 dan Perpres 154. Itu maksud kita, Pak Menteri.

Nah, kalau katakanlah semuanya dia nggak bisa, ya gimana, Pak Ketua? Kita nggak bisa mutuskan ini.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ujung-ujungnya, kita akan membahas per item lagi, apa namanya nih, pembinaan umroh dan haji khusus, pelayanan haji dalam negeri, pembinaan haji, pengelolaan dana haji, dan sistem informasi haji, pelayanan haji luar negeri. Pada akhirnya kita buka dan akan kita tanya lagi, sebetulnya anggaran yang disiapkan sekarang ini, existing itu berapa, Pak Dirjen? Mulai dari September, Oktober, November, Desember, berapa anggarannya, Dirjen, untuk pelaksanaan haji 2020? Begitu juga lah nanti di 2026. Nah, kalau tidak ada anggaran untuk proses perhajian kita 2026, terus komisi lapangan Komisi VIII di mana? Komisi VIII disalahkan terus. Sekarang akan kita tanya ini, berapa yang dianggarkan? Anggaran Dirjen PHU sekarang mulai dari September,

Oktober, November, Desember itu berapa persiapan haji 2025? Seperti itulah kira-kira nanti 2026.

Kalau tidak ada, ya nanti terserah para anggota, akan kita hadapi risiko yang akan datang. Tapi DPR akan membuat satu pasal bahwa kami tidak mau dipersalahkan, karena kami sudah mengingatkan ini. Tentu akan kami sebut nanti bahwa Menteri Agama hanya mengalokasikan anggaran sekian. Gimana, para anggota, gimana?

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Dari mana ini sekarang? Oh, silakan.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Terima kasih, Ketua.

**Yang kami hormati Wakil-wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII, Bapak Menteri, Wakil, Bapak Kepala Badan Jalangara Haji, dan Wakil serta Kepala Badan Halal tadi katanya. Mudah-mudahan wakil-wakil semua kita yang hadir di sini di ruangan.**

Saya cuma ingin, sebenarnya logikanya sama dengan yang terakhir Ketua sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Pada waktu kita merencanakan APBN 2025, gitu kan, Kementerian Agama, itu asumsi yang dipakai asumsi bagaimana? Satu, asumsi bahwa badan BPHJ ini belum menyelenggarakan ini. Berarti asumsinya, Kementerian Agama merencanakan sukses haji 2024–2025. Seperti itu juga bagaimana sukses haji 2026, kan begitu. Tapi sehingga kekurangan anggaran ini tidak terlalu jomplang. Ini anggarannya Rp129 miliar, tetapi kekurangan Rp226 miliar. Itu lebih dari hampir dua kali lipatnya. Atau asumsi yang dipakai adalah bahwa 2026 itu akan diserahkan kepada penyelenggara haji. Otomatis ya, sebagaimana asumsi bahwa itu diselenggarakan tetap oleh Kementerian Agama. Secara ini untuk penyelenggaraan haji 2026 sudah ada di situ. Paling-paling kekurangannya di SOTK-nya, kan begitu.

Tapi kalau kita memang dari awal asumsi kita bahwa menyusun anggaran 2025 ini adalah akan diserahkan kepada BPHJ 2026, otomatis kita sudah mempersiapkan berikut sukses haji 2026. Berikut juga SOTK-nya sudah ada di situ, paling tidak mendekati. Kalau ini kan jauh sekali, 226 kekurangan, 227, yang ada 129. Nah, ini, Ketua, saya mau tanya dulu. Kementerian Agama ini merencanakan dulu, asumsi yang mana dia pakai, gitu kan? Diserahkan ke

BP Haji atau tetap di Kementerian Agama? Nah, dan kemudian untuk kekurangan 226 atau 227 ini hampir, itu SOTK-nya berapa, kebutuhan SOTK-nya? Jadi maksud saya agar kita tidak terlalu jauh begini. Itu maksud saya kan kalau kita mau bedah secara kasar aja, APBN 2023 berapa, untuk PHU 2024 berapa, 2025 berapa, kita sudah bisa melihat perbandingannya, ya kan? Itu. Terima kasih, Ketua, mudah-mudahan dipahami.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya, kita pahami, bukan tidak pahami. Ini pemerintahnya aja ini. Badan seperti itu sudah satu jam berunding, tetap 129. Tapi jangan berpikir MOU mengalokasikan anggaran bisa kita buat di sini. Kami tidak mau. Jangankan antar badan, kembali lagi saya ingatkan, jangankan antar badan. Antar Dirjen pun harus ada persetujuan pengalokasian pergeseran. Baru bisa. Itu hak *budgeting* namanya. Mau berunding dengan Menteri Keuangan, harus disahkan di DPR.

Jadi, total tidak ada anggaran persiapan haji 2026. Kalau setuju dengan posisi anggaran yang dialokasikan, kita buat beberapa pasal bahwa Komisi VIII tidak terlibat dengan penganggaran itu. Sebetulnya, dengan hak *budgeting* itu dan pasal 51 ini, kita bisa mengukur lagi satu-satu, kita tarik.

Nah, sekarang bagaimana? Kami yang membuka, atau Bapak-Bapak yang kembali lagi terkait dalam *meeting* ke pemerintah?

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Pemimpinan,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Apalagi, Bu?

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Boleh menanyakan, *nggak*? Hanya ingin penegasan, ya. Hanya ingin penegasan saja supaya ada bayangan di kita, dengan penganggaran satu. 129, seperti yang disampaikan oleh badan penyelenggara haji, artinya tadi menyampaikan bahwa dia tidak bisa maksimal untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Tadi kan seperti itu, ya, karena penyelenggaraan

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

129 itu sudah masuk angka, dan penyelenggaraan haji 2025, habis.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Ya habis itu.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Selesainya agustus itu dilaporkan.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Setelah Agustus *enggak* ada lagi.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Artinya begini, kalau bicara seperti itu tadikan disampaikan oleh BPH bahwa ada namanya Satker tingkat provinsi, Satker asrama, Satker tingkat kabupaten/kota, kemudian ada Biro Perencanaan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Hukum, Biro Keuangan dan Umum, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat. Nah, yang namanya biro-biro dan lain-lain ini, mereka kerjanya mulai kapan? Anggarannya di mana? Karena kalau berdasarkan yang disampaikan dari materi yang Bapak-Bapak sampaikan kepada kami, itu di anggaran 267M. Kalau itu di anggaran 267M, artinya yang mempertanggungjawabkan keuangan 129 siapa? *Gitu* loh.

Jadi ini nggak nyambung juga, nih. Jadi, anggaran 129 dengan anggaran 267 harusnya menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan, nih, Pimpinan. Karena di dalamnya ada Inspektorat, ada Pusat Data dan Informasi, ada Biro Sumber Daya Manusia dan Hukum, ada Biro Keuangan, gitu loh. Nah, itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oke.

**F-P. GOLKAR (H. HASAN BASRI AGUS):**

Tapi izin, Pak Ketua. Pak, kanan, bisa, Pak? Bisa, Pak?  
Oke, baik. Terima kasih, Pak Pimpinan.

Lama sekali perundingan antara BPH dengan Dirjen Haji. Kami pikir ini sudah selesai. Ternyata di antara Bapak itu tidak ada kesepakatan. Nah, sekarang kita kembali kepada Pak Menteri Agama. Solusinya bagaimana, Pak? Soalnya semuanya tanggung jawabnya Bapak, gitu. BPH ini juga bertanggung

jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam pasal itu dibunyikan seperti itu. Lalu, solusinya bagaimana? Yang jelas tadi sudah digariskan dalam sisi undang-undang, segala sesuatu perubahan anggaran minta persetujuan Dewan.

Tadi katanya ada MOU. MOU itu tidak bisa juga tanpa ada pengetahuan Dewan, gitu. Saya rasa demikian, Pak Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya baik. Apakah bisa kita setuju, kita serahkan kembali ke pemerintah untuk menyampaikan *statement* di hadapan forum Raker kita bahwa yang bertanggung jawab tentang pengalokasian itu tidak bisa, Pak? Pasalnya di sini ketongnya gimana?

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Ketua, Ketua izin. Ketua, Ketua, mohon izin, ketua. Izin, Ketua,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ingin menghindar dari persoalan untuk disalahkan, tapi ternyata nggak bisa, ketoknya di sini, Pak.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Ya, ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Jadi besok kita sah kan anggaran yang akan datang bagaimana?

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Izin, Ketua.

Begini, Pak Ketua. Kita hanya ada dua pilihan. Saya pikir rapat kita malam hari ini memberikan dua pilihan: yang mencarikan kekurangan untuk menjamin sukses haji 2026 itu Komisi VIII bersama kementerian, atau

kementerian sendiri yang mencarikannya. Kan Dirjen di Kementerian Agama bukan hanya PHU. Atau Dirjen-dirjen lain. *Tapi* boleh nggak kita

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Tidak boleh

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Berdasarkan undang-undang menggeser dari Dirjen-dirjen lain?

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Intrupsi, Pimpinan, sedikit bicara, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Wah ya. Pak Aprozi.

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Terima kasih.

Saya mengkaji dari pertama, ini tidak ada titik temu. Karena dari Kementerian Agama sendiri, ini tali kulur. Saya mencermati dari seluruh anggaran yang ada, dan saya sudah belajar dengan Pimpinan tadi. Apakah pasal ini bisa dibuka semua? Bisa, setelah 3 tahun 30 hari disahkan dengan anggaran APBN. Kita nggak mau buka, Pak Menteri. Saya pikir kalau kita sepakat, Pimpinan, besok kita akan balik purna. Kita tunggu mereka, jam 2 harus ada jawaban. Kalau ini mau terus, ini sampai subuh, ini bisu semua karena nggak ada yang mengalah. Dirjen Haji, saya pikir, mana dana kamu? Ya kasih ke sini dong. Nanti dari Dirjen ini Bimas Kristen kasih ke sini dong. Ini berunding nggak? Kasihan, Pak Menteri, yang bertanggung jawab terhadap anggaran ini. Dan kami tidak akan mengesahkan ini, Pak Menteri.

Soal MOU tadi, tidak ada anggaran sepeser pun yang berkaitan dengan APBN disahkan oleh DPR. Itu kami pertegas. Tidak ada rundingan Anda dengan Menteri Keuangan. Tidak ada rundingan Anda dengan Bapak Nas yang ada di sini mengesahkannya. Saya pikir begitu, Pimpinan. Kalau kita sepakat, kita skors sampai berapa? Biar mereka begadang. Kita melihat besok.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Saya kira untuk menghindari langkah-langkah kita ke depan, ada baiknya Pak Menteri kami beri kesempatan untuk menjelaskan lagi ke Menteri Perencanaan Pembangunan. Ya nanti kita cari lagi lah harinya untuk kita minta

izin lagi menesahkan berikutnya. Apa boleh dibuat? Bisa nggak ya? Ya boleh. Yang penting ada solusi, tapi terkecuali badan nggak siap, ya? Badan udah siap, nih?

**WAKIL KEPALA BPH (Dr. DAHNIL ANZAR SIMANJUNTA S.E., M.E.):**

Izin, Pimpinan. Dalam posisi kami tentu sejak awal tadi saya sebutkan bahwasannya kami *given*. Nah, setelah kami masuk, tentu kami berhitung ulang, apalagi SOTK kemudian muncul. Ternyata itu kurang. *Nah*, terkait dengan itu, kan tadi saya sebutkan karena *given*, kami minta tambahan. Namun, kan tidak memungkinkan untuk ditambah. Nah, tentu kami tidak ingin dalam posisi badan tidak bisa bekerja secara efektif. Tapi kami menginginkan penyelenggaraan haji itu sukses, itu catatan pentingnya. Nah, oleh sebab itulah ini perlu solusi dalam konteks kami, ya solusi gimana caranya supaya badan ini bisa bekerja dengan efektif, jalan, namun uangnya ada. Begitu loh. Jadi dari sisi 129 itu relatif tidak bisa di-cover. Tapi kalau kemudian ada keputusan, ya kami harus jalani dengan 129 itu ya. Tadi kami sebutkan ini *given*. Ya kami berusaha semaksimal mungkin dengan catatan jangan ditagih untuk beberapa hal kepada badan. Karena kan penyelenggaraan ini 2025 itu sepenuhnya di Kementerian Agama. Kami kemudian melakukan tugas-tugas dukungan.

Tadi yang terkait dengan persiapan 2026. Kami kira tadi setelah berembuk bisa di-cover menggunakan MOU. Ternyata kemudian tidak bisa. *Nah*, itu yang kemudian jadi *bottlenecking* sekarang. Kami sendiri kemudian tidak menemukan solusinya. Jadi dalam posisi itu, karena tidak bisa MOU, kemudian batas waktu kita hari ini. Kalau tidak, kemudian nanti anggaran kita diblokir. Malah itu lebih merepotkan lagi bagi kami dan juga bagi penyelenggaraan haji di 2025 ini. Kayaknya begitu.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Pimpinan, pimpinnan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Apa Pak Wit?

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Saya kira begini, ini tadi Badan sudah bicara ya, Pak Sekjen sudah bicara. Ini solusinya adalah tanggung jawab anggaran di Kementerian, di Pak Menteri. Saya ingin mendengar, ya, dari Pak Menteri, mendengar apa solusi yang akan diberikan pada masalah keruwetan ini, kan. Jadi, mohon Pak Menteri, ini ada *statement* dari Bapak untuk menyelesaikan masalah ini.

Jadi, saya ini di DPR ini bukan ingin urusan, apa, mendikte Bapak. Tapi ini tugas kami dari pengawasan dan sesuai dengan Kepres itu, 152-154, bagaimana itu supaya mereka, badan, sudah bisa bekerja. Apalagi kepentingan ini 2026 mereka harus bisa jalan, kan begitu. Jadi mohon untuk *statement* Pak Menteri, apa yang disampaikan pada kita ini. Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, tadi saya sudah mengusulkan itu ya. Masih ada usulan lain? Oke, kita beri kesempatan sama Pak Menteri untuk memberikan.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Baik, Pak.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertama-tama saya ingin mohon maaf ya, sebetulnya ada dua hal yang kita inginkan bersama pemerintah dengan Komisi VIII. Pertama, ingin tuntas persoalan keuangan haji, dan yang kedua, kita ingin menetapkan dan kepastian nanti penyelenggaraan berikutnya, angka-angka yang ONH-nya itu lho, Pak. Dan ini kita juga dikejar waktu, tapi ternyata banyak sekali yang terjadi di luar bayangan saya. Namun demikian, yang kedua, saya ingin pelajari juga bahwa angka-angka sebetulnya yang pernah disusun ini itu ketika disusun waktu itu belum ada badan, ya kan, Pak. Angka ini perencanaan dilaksanakan pada tahun yang lalu, ketika pada waktu itu belum ada bayangan bahwa badan itu akan ada. Nah, sekarang tiba-tiba pemerintah melihat dengan satu pertimbangan tentu matang bahwa harus ada badan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah kepada haji ini.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Izin, Pak Menteri, di dalam keputusan memutuskan anggaran 2025, ada dua item, dua klausul menyebutkan anggaran yang diputuskan 2025 ini akan menyesuaikan dengan kebijakan Presiden. Itu sudah direncanakan, Pak, tapi karena badannya tidak ada, maka tidak disebut besaran alokasinya. Tapi dalam penetapan anggaran itu sudah disebutkan, akan ada pembelahan. Itu sudah ada, gitu, Pak.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Itulah, Pak. Jadi karena di tengah jalan, apalagi di bagian akhir perjalanan tahun ini, muncul badan. Tentu di sini juga ada semacam *double* anggaran, ya. Satu sisi PHU harus menjalankan tugasnya, Dirjen dengan segala macam, eselon 2-nya di situ, tapi juga ada badan dengan segala

kelengkapannya juga harus punya anggaran untuk itu, sementara anggaran tambahan tidak ada. Jadi persoalannya akan di situ.

Nah, jadi Pak siapa tadi menyebutkan bahwa Pak Hasan, Pak Hasan Basri tadi, mana tugas Dirjen dan mana tugas badan, dan pertanggungjawaban keuangannya pun juga itu, ya itu tadi. Ujung pertanyaannya itu sampai ke sini juga ya. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya kita konsisten dengan Kepres atau kesepakatan kemarin bahwa tahun ini masih dilaksanakan oleh Kementerian dan untuk badan sementara menjadi pendukung dulu sampai menunggu kelengkapannya dan periode efektifnya nanti dituangkan depan, barangkali mungkin persoalannya tidak seserumit ini.

Nah, *tapi* karena kita akan memfungsikan badan ini lebih awal dan badan juga kelihatannya sudah akan siap untuk itu, ya persoalannya berikut tidak ada tambahan dana dari sumber dana. Nah, jadi kami coba tadi mendiskusikan dengan teman-teman. Dan ini mau diambilkan dari mana? Ini nanti kan ada gaji, tidak mungkin bisa dipotong. Kemudian juga ada SBSN, itu juga agak sulit untuk dipaksakan ke situ. Nah, jadi karena ini adalah sudah malam seperti ini, kami agak sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah yang lain.

Maka itu kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan, karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan, misalnya, pihak keuangan, Kementerian Keuangan, atau Bappenas. Maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kembali lagi menjumpai Bapak.

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Pimpinan, izin Pimpinan. Mohon izin, Pak Menteri, izinkan Pimpinan.

Saya mohon izin, Pak Menteri. Dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini, Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai, Pak. Saya dari tadi memantau, Pak, dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini, Pak. Pak Menteri dengan segala kemampuannya, saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya, Pak Sekjen, kok persoalan ini begitu rumit, Pak.

Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini, Pak. Baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama, Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnyanya. Jangan sampai kemudian BPH ini dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apa yang diamankan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden, begitu.

Tadi Pak Hasan Basri Agus sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres sendiri sifatnya dukungan. Ini yang Bapak belur ini Pak, yang Bapak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BP Haji ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi VIII sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf, maaf sekali lagi, satu jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu? Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak, tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Selly tadi Pak, ini soal umat Pak. Soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik-menarik, gengsi, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada penyelesaian pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji 2025, Pak. Kami Komisi VIII sebagai pengawas haji akan datang, tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu?

Kalau saya berpendapat, pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja kalau memang isi dari PRPS itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BP Haji menyesuaikan. Tentu target SOTK ini menjadi penting juga Pak. Nah, yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BP Haji sesuai dengan anggaran yang disusulkan, dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini gak tumpang tindih Pak sejarah? Misalnya, contoh saja, di sana yang nerima siapa nanti? BP Haji atau Dirjen Haji? Untuk apa, dan lain-lain. Saya ini belum haji Pak Menteri, Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan haji di depan mata ini, Pak Sekjen. Di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau resis Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang Dapilnya di Jakarta, ada di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua, dan seterusnya Pak Achmad, bagaimana Pak Achmad?

Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah, luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan ini menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini posisi kita tidak rumit Pak Menteri, tinggal Pak Menteri permuka tegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kepercayaan oleh Pak Prabowo, laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali tidak ada yang jadi soal ini Pak, Bapak bertanggung jawab penuh, Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BP Haji kau sekian anggaran kau, selesai, Dirjen laksanakan ini, BP Haji laksanakan ini. Gitu, gak ada yang tumpang tindih ya napa soalan nanti 2026 baru nanti BP Haji intervensi baru ambil alih, menurut saya seperti itu Pak, kami

dari fraksi PAN Pak, *gitu*, ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak, siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Jadi jangan direbut semua, BP Haji mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mau mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri, Dirjen anaknya Pak Menteri, BP Haji juga anak, anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu, anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Dari istri ke?

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Nah, izin Pak Menteri, mohon maaf, dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita, apa sih yang terjadi ini Pak gitu? Nah tentu, kalau kami ini mengikuti, bagaimana pimpinan kami Pak? Gitu, kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arah pimpinan, *tapi* tentu saya kira demi kebaikan kita bersama, ini kan ditonton oleh jutaan, khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak, *gitu*, jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat, tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Achmad, kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya *gitu*, cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak, gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut masyarakat.

Pak Sigit cukup?

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Cukup Pimpinan.

Terima kasih banyak Pimpinan, mohon maaf tadi.

*Wa'alaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Saya kira ide-ide cerdas yang bermunculan dari para anggota memang ada pilihan-pilihan. Kalau kita sahkan malam ini, risikonya di 2026 kita akan sulit menghadapi perhajian kita, tiba-tiba badan akan menyelenggarakan haji sepenuhnya. Resiko. Kita beri kesempatan, tentu pemerintah akan kesulitan anggaran yang belum disahkan. Tetapi saya kira kita kasih kesempatan kepada

Menteri untuk membawa rapat lagi dan kita agendakan secepatnya. Tapi pertimbangan tadi yang dari beberapa para anggota yang baru saja disebutkan, umpamanya.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Pemimpinan terakhir, bisa terakhir sekali. Mungkin ada solusi. Oh baik.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oh iya, silahkan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Ini kan kekurangan kan Rp226 miliar Pak ya, nah kami sarankan kepada Pak Menteri ini dirjen-dirjen ini kan ada Pak ya, kan boleh disisir Pak, mana prioritas, mana yang bisa tidak dilaksanakan 2025, walaupun sudah ketok palu Pak. Jadi maksud kami beberapa dirjen ini sehingga memberikan angka Rp226 untuk melengkapi BPH itu. Biasa itu Pak, kita sisir kembali, pengalaman kami gitu ya, disisir, *tapi* hasil sisir itu harus dilaporkan ke Komisi Delapan. Terus yang 226 ini dari BPH, juga disisir juga, mana kira-kira yang sangat mendesak, urgensi, itu Pak. Rp226 kan belum kami sisir, jadi sehingga sama-sama tolong ansur gitu.

Saya kira dengan kebenaran Pak Menteri, itu bisa kita Pak menyisir kembali optimisasi namanya terhadap anggaran dirjen-dirjen ini, gitu lho Pak, itu, pasti akan ketemu nanti jadi kebenaran itu ada Pak, kami kira begitu Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oke Baik, Pak Menteri.

**F-P. GERINDRA (F. ALIMUDIN KOLATLENA):**

Pimpinan, Pimpinan saya belum ke Pak Menteri sebelah kanan Pimpinan,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Silakan.

**F-P. GERINDRA (F. ALIMUDIN KOLATLENA):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,*

**Pimpinan, anggota pimpinan, dan anggota Komisi Delapan yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Kepala Badan Haji, Wakil Kepala Badan Haji, dan ada juga Pak Haikal yang saya hormati.**

Memang tadi disampaikan Pak Menteri, ini kan sudah semakin larut ini, semakin ngantuk, capek, pusing, *tapi* sebenarnya semakin larut itu ada ilham yang kita dapatkan. Tadi saya kira solusi terakhir dari Pak Pasha. Kan Badan haji ini kan di dalam PPRS itu kan dia sebagai pendukung. Badan Haji pun lahir dibentuk itu di ujung. Dan waktu kita kan tinggal beberapa hari. Karena itu, badan haji menyesuaikan saja anggarannya. Anggaran yang ada itu lebih diorientasikan kepada dirjen dan badan yang sudah ada di kementerian. Jadi badan haji itu dengan anggaran yang sedikit itu disesuaikan saja. Nanti tahun 2026, semua sumber daya keuangan itu baru diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun 2026. Tapi untuk hari ini, badan haji itu seminimalis mungkin gitu. Kita menyesuaikan saja.

Jadi saya kira tadi yang terakhir itu solusi yang paling ditawarkan oleh Pak Pasha, itu saya kira itu pimpinan yang ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama, pimpinan. Jadi kita tidak perlu terlalu panjang lebar dari hari sampai dini hari. Saya kembalikan Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, kita perpanjang tanpa terbatas.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin Pimpinan. Pelan-pelan. Boleh Pak?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, silahkan Pak Bidin Fikri. Nyesal saya tanpa batas.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Saya mencoba pelan-pelan tapi tenang, kita bisa selesaikan lah ini ya. Yang pertama, toh, anggaran ini kan sudah diketok, betul ya,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Anggaran mana?

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Anggaran yang 78, maaf 79, sudah kurang 1, banyak gitu ya, sudah diketok. Saya bacakan aja ini, tadi Pak Menteri sudah mencoba untuk kalau bisa besok rapat lagi, akan dikomunikasikan lagi begitu. Nah besok itu kan paripurna penutupan sidang, itu nah bisa *diplop*, saya kira kita selesaikan malam ini. Mau kita sisir sama-sama, atau kementerian yang menyisirnya. Kenapa? Saya bacakan ketentuannya. Pasal 27 Paragraf 6 Hak Pengawasan, ayat 3, sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Kementerian dan Lembaga wajib menyerahkan kepada Komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBN ditetapkan di paripurna DPR. Bisa. Satu dirjen aja bisa kita sisir nih. Bisa kita belanja, ini pindahkan, ini pindahkan, ini pindahkan. Bisa. Itu hak pengawasan DPR, Pak. Di undang-undang MD3, Pak. Bisa. Nah, lebih baiknya kementerian yang menyisirnya. Kita beri skor sisirlah sampai selesai, kita skor lagi,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik begitu ya.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Sekiranya itu Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini Pak Menteri, tambahan usulan yang 129 ini harus ada disebutkan persiapan 2026. Kalau tidak disebutkan, itu kesulitan nanti, Komisi VIII salah membuat alokasi anggaran ini. Jadi harus ada alokasi anggaran setelah diselesaikan penyelenggaraan Badan Haji 2025. Berapa itu dibutuhkan? Pak Hilman sebagai Dirjen PHU, berapa anggaran yang dibutuhkan mulai dari September sampai Desember? Itulah yang harus dialokasikan di Badan.

Kemudian, karena sifatnya adalah kita sebutkan perbantuan, salahnya kan nggak diserahkan ke kita MOU-nya seperti apa. Jangan-jangan belum ada. Maka anggaran yang disebutkan di sini ini, ini menjadi anggaran persiapan haji di 2026. Operasional mereka melekat di Dirjen Haji. Melekat. Jadi perjalanan mereka tarik lagi dari yang ada itu. Di sini kan ada ini, pembinaan umroh dan haji khusus, sementara di Dirjen PHU masih ada seperti itu. Ya sudah berarti yang ini tetap melekat di badan, badannya ada di situ. Kasih anggaran lagi sama dia, tapi anggarannya ada di PHU. Kalau menurut Pak Menteri tadi, ini kan masih penyelenggarannya Menteri Agama. Maka karena itu, semua operasional yang ada di persiapan yang disebutkan di sini, disebutkan pemerintah tadi di sini, kita baca lagi nih, di halaman 21, Pak Menteri bahannya Pak Menteri ini, bukan bahannya Komisi VIII itu ada pembinaan umroh dan haji khusus ada pelayanan haji dalam negeri semua perjalanan badan itu ada di

sini anggaran ini ada di sini sementara 129 itu alokasi ya haknya mereka untuk bekerja dan persiapan haji 2026. Kami tadi menganggap bapak-bapak itu sudah selesai tentang itu. Karena senyum-senyum bubar. Oh, sudah selesai ini pikiran, pikiran kami itu memendunya cukup lah. 2026 mana persiapan haji. Sementara yang ini kalau sudah seperti itu, sampaikan ke badan sepanjang ini sampai selesai haji. Rasional kalian ada di sini, di anggaran ini. 129 alokasikan untuk gaji dan persiapan untuk Haji 2026. Karena itu kami skor tuangkan itu.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 23.24 WIB)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Saya ingin menyampaikan, Pak ya.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Tadi sebelumnya Pak Menteri itu penjelasannya belum selesai, diputus oleh Pak Pahsa. Itu lho,

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Belum selesai tadi. Ini tadi penjelasan saya.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Saya pimpinan, saya setuju. Ini Pak Menteri tadi itu belum selesai aslinya. Saya lanjut ya Pak.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. NASARUDDIN UMAR, MA.):**

Jadi kami punya dua alternatif ya. Pertama, penyisiran itu. Kami sepakat bahwa penyisiran ini tidak ada cara lain. Pertama yang kami akan sisir, tentu yang pertama di sekitar penyelenggaraan haji umrah dan termasuk plus-plus ini. Dan yang kedua juga kami melihat di sini ada di Jam Bimas Islam, pendidikan, dan juga beberapa nanti kami akan ambil sedikit demi sedikit sampai nanti mencapai jumlah yang dibutuhkan di tempat yang lain. Tetapi nanti itu juga nanti saya akan konsultasi dulu dengan teman-teman, siapa tahu nanti terlalu banyak kita potong, sementara ada hal-hal yang krusial juga diantara mereka. Jadi mungkin saya perlu dalam waktu satu jam terakhir ini, Bapak izinkan kami untuk menyisir kembali ya, karena terus terang sebelum kami berangkat ke sini, saya pikir enggak ada masalah, ya jadi sudah, ya karena ini angka-angkanya sudah seperti ini. Ternyata setelah Pak Ketua tadi membayangkan nanti tahun 2006 itu gimana, saya baru ngah itu, oh iya ya. Jadi mungkin sukses tahun 2005 ini, tapi tahun 2006 ini bisa gagal itu. Atau sebaliknya kita, kita memperhitungkan 2006 tapi ini bisa terhancam, maka itu

terima kasih Pak Ketua, jadi saya betul-betul tampak diperkaya di sini. Dan insyaallah saya kira solusinya bisa, kami yang akan mengambil alih Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak Menteri, catatannya. Menyisir alokasi anggaran dari dirjen lain harus hati-hati. Karena kami sudah mensahkan itu. Kalau terkait program, kami nggak setuju. Tapi kalau terkait perjalanan dinas, dokumen-dokumen, disilakan. Tapi kalau sudah program, itu kan sudah kita bahas kemarin, Pak. Statement Pak Menteri yang menyebutkan, umpamanya perjalanan dinas nongol sehari, ngumpet sepuluh hari. Nggak setuju kita, Pak, kalau yang itu. Tapi kalau sudah program, jangan Pak.

Ya, kami yakin Pak, ini bisa sebetulnya solusi. Cuma ke Pak Menteri tidak dijelaskan. Sebetulnya kalau dari awal ini dijelaskan oleh staf bapak seluruhnya tentang yang akan kita hadapi, itu bisa selesai. Lah, umpamahnya yang tadi itu. Ya ke kepala badan juga harus. Ya ini kan penganggaran yang ini. Sebetulnya *double-double*, stabil juga. Sama kan ini, pembinaan haji, pengelolaan dana haji, ini *copy paste* juga nih. Kalau seperti itu, ya sudah nempel aja di sini, nempel saja di sini nih anggaran ini. Yang 129 ini, maka Pak Hilman sebagai Dirjen Haji, sebetulnya anggaran yang disiapkan persiapan haji berikutnya itu berapa? Cukup nggak 129? Dengan gaji-gaji mereka semua stafnya. Nah, ini yang kita. Sementara pelaksanaan mulai hari ini, mereka nempel di anggaran ini, anggaran yang sudah ada ini, ya, gitu ya. Kami berikan waktu ya Pak Menteri.

**KEPALA BPJPH (AHMAD HAIKAL HASSAN):**

Izin, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sekarang.

**KEPALA BPJPH (AHMAD HAIKAL HASSAN):**

Izin Pak Ketua, izin interruptsi Pak Ketua. Haikal Pak,

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya.

**KEPALA BPJPH (AHMAD HAIKAL HASSAN):**

Izin interruptsi. Kebetulan kami disini sudah tidak punya hak suara karena itu adalah antara.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak, memetuk anggaran ini nggak bisa hanya anggaran Bapak, terkait dengan ini. Kalau Bapak tidak kepingin anggarannya ditetapkan, ya persilahkan.

**KEPALA BPJPH (AHMAD HAIKAL HASSAN):**

Sepakat, sepakat. Sepakat Pimpinan.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Kecuali kali ini di Kementerian Sosial, bisa pulang.

**F-P. GOLKAR (Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.Kom.):**

Ijin Pimpinan, ijin. Sedikit saja, sudah ditutup?  
Sudah?  
Sudah?  
Oke.

Sedikit saja, karena saya rasa ini penting sekali untuk memberikan penguatan kepada Pak Menteri, mengapa penting sekali untuk menambah anggaran bagi badan. Bapak izin, jadi saya melihat di halaman 8 ini Bapak dan Ibu, ini kita harus melihat tujuan kita membuat badan ini apa, karena saya melihat bahwa program dukungan manajemen isinya adalah operasional, belanja pegawai, operasional perkantoran itu lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan keumatannya, itulah kenapa saya kira ini perlu sekali untuk ditambah Bapak, ini kita lihat program dukungan manajemennya 66 miliar, sementara untuk keumatannya 63 miliar, apa yang kita cari, bubarkan saja Pak kalau begini.

Maka oleh karena itu tadi saya sepakat dengan pimpinan dan teman-teman yang lain, bahwa tolong disisir dari ditjen khususnya Ditjen Haji begitu, karena tidak boleh ada tumpang tindih di dalamnya, maka serahkan kepada badan yang kita sepakati bersama ini. Terima kasih pimpinan

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Kan tadi ini, surat Menteri Agama ini dijadikan contoh. Ini suratnya datang lagi lain lagi ini, gimana sih? Kan ini usulan Menteri Agama, di dalamnya ada Badan Penyelenggara Haji, tadinya 129, kan berubah, tinggal merubah ini saja.

Datangnya surat kayak gini nih, suratnya Pak Irfan, yang mau kita bahas ini anggaran Menteri Agama setelah dibagi. Gimana sih, teman-teman ini

semuanya. Ini surat, surat Menteri Agama. Nah, jadikan contoh. Nih, jadikan contoh, tinggal tukar aja ini, 129 ini menjadi berapa? Lah kok jadi yang lain ini dikirim, ke kita, apa yang harus saya baca ini sekarang ini?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Izin.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Yang ngurus apa, surat-surat biasanya siapa Kementerian Agama? Ayo dong.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini surat yang dirubah itu hanya Badan Penyelenggara Haji. Nah, Badan Halal bagaimana nggak disebut itu?

Ini menjadi 179 kan? Ya ini dia. Jadi kenapa yang dikirim ini?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Aduh, aduh, aduh, aduh.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik, terima kasih. Skors kita cabut.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**SKORS DI CABUT PUKUL 00.44 WIB**

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Setelah dilakukan pembahasan dan perundingan bersama Menteri Agama dengan badan yang akan menyelenggarakan program sendiri dengan pengalokasian anggaran, maka karena sudah dapat dicantumkan, sebagaimana diusulkan oleh Menteri Agama dengan perubahan yang awalnya diajukan badan penyelenggara haji dialokasikan anggarannya Rp129.739.096.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi 179, jadi bertambah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya tetap seperti yang dicantumkan usulan Menteri, Rp436.820.997.000. Karena ini sudah kesepakatan diantara Menteri dan Badan dan kami ingin memastikan bahwa

pengalokasian anggaran 179 ini dicantumkan untuk alokasi persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026.

Sebesar apa yang dibutuhkan dari Rp179 miliar ini, maka nanti akan ada lagi pendalaman kita untuk pengalokasian ini, penajamannya di bidang apa saja, termasuk di badan halal, program yang sudah disebutkan itu dan tentu juga nanti dengan Kementerian Agama yang semula anggarannya 79.168 miliar menjadi Rp78.552.159.164.000. Nanti akan, karena ada pengalokasian yang bergeser dan tadi ada Rp50.000.000.000.000 yang ditambahkan ke Badan Penyelenggara Haji nanti akan kita uraikan menyampaikan kembali apa saja yang dikurangi dan kita akan masuk ke penerjaman program berikutnya.

Karena sudah ada kesepakatan, maka masuk kita ke kesimpulan supaya kita sahkan dan kita ketok sehingga Pak Menteri, Badan, Badan Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal besok sudah bisa menyampaikan ke Menteri Keuangan bahwa di Komisi VIII sudah disahkan mudah-mudahan bisa bergerak dengan program dan tidak lagi di bintang programnya.

Mohon ditayangkan kesimpulan.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Sebelum membaca kesimpulan. Yang pertama, kita perlu tahu juga mungkin walaupun sebenarnya kita sudah minta Kementerian Agama sendiri yang mencarikan 50M itu, itu diambil dari mana, karena itu ada pergeseran pastinya kan. Nah, jadi kita perlu tahu di sini, tolong menjelaskan. Yang kedua, Badan Halal, tentu dari alokasi anggaran untuk sertifikasi halal tadi, itu tentu ada pendapatan. Kalau boleh tahu di sini atau perlu atau tidak, saya ingatkan mungkin perlu juga kita tahu ada enggak rencana pendapatan dari situ. Itu yang saya maksud, jangan hanya belanja saja, pengeluaran saja, tapi ada juga pendapatan biar kita juga.

Izin itu aja Ketua.

Makasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, nanti kita cantumkan poin tentang itu pengalokasian anggaran ini untuk penyelenggaraan programnya kita akan rapat berikutnya. Baik Menteri Agama, Badan Halal, maupun Badan Penyelenggara Haji. Karena disini kan masih disebutkan pengalokasian ini kalimat yang dicantumkan adalah

kerukunan umat dan layanan umat beragama, masih itu judul besarnya. Judul besar ini kita bahas nanti kemudian di forum berikutnya, memastikan bahwa alokasi persiapan haji itu dicantumkan. Nanti setelah disahkan ini, kita minta dan poin itu kita sebutkan di sini, poin berikutnya nanti dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 untuk dialokasikan anggaran yang dari 179 miliar.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Sudah?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini mohon dibantu para Anggota gimana nanti cara membuat kesimpulan ini.

Pertama, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kepala BPH Republik Indonesia, Kepala BPJPH yang membahas realokasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2025, rencana kerja dan anggaran BPH RI tahun anggaran 2025, serta rencana kerja dan anggaran BPJPH RI tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia, BPH Republik Indonesia, dan BPJPH Republik Indonesia tahun anggaran 2025 setelah restrukturisasi dengan rincian sebagai berikut:

- A. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar Rp79.168.712.137.000, kemudian dialokasikan untuk BPH RI sebesar 129.

Oh, ini yang saya pegang yang salah.

Rp179.739.000.976.000 dan untuk BPJPH sebesar Rp436.812.000.997, maka anggaran maka menjadi, maka alokasi anggaran, ya nanti kita sempurnakan, maka menjadi Rp78.550.159.164.000 rupiah yang dialokasikan berdasarkan unit Eselon I.

Sebagaimana tabel B, Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia pada tahun anggaran 2025 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp179.739.976.000 yang dialokasikan berdasarkan program dukungan manajemen Rp66.000.000 sebagaimana tabel, BPJPH dialokasikan Rp436.812.997.000 yang dialokasikan berdasarkan Unit Eselon I, sebagaimana tabel.

Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama, Kepala BPHRI dan Kepala BPJPH agar pelaksanaan program dan anggaran tahun anggaran 2025 memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagaimana berikut:

- A. Kementerian Agama Republik Indonesia dan BPH. Satu,

merumuskan mekanisme pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji mengingat anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2025 ada yang dialokasikan untuk Kementerian Agama dan ada yang dialokasikan untuk BPH RI.

Maksudnya apa sih?

Dua, menyusun kebijakan program dan langkah-langkah strategi peralihan penyelenggaraan ibadah haji dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

B, Memastikan pencapaian target sertifikasi halal produk pada tahun 2025.

Ya, kami persilakan para anggota menyempurnakan kesimpulan kita supaya tepat sasaran. Tadi saya kira menyebutkan bahwa program yang di sasar pengalokasian anggaran ini akan dibahas kemudian di rapat-rapat berikutnya, ini belum dimasukkan.

Kami persilakan para anggota dulu.

**F-PKS (H. ASKWENI, S.Pd.):**

Saya pikir Ketua, tadi yang saya sampaikan, jadi dengan adanya pergeseran itu kita mungkin lihat juga di matrik ini. Maksud saya 50M itu diambil dari mana gitu kan. Jadi kelihatan nanti, dari semula berapa sekarang jadi berapa gitu.

Nah, kan ini konteksnya ada perubahan. Biar kita bisa melihat maksud saya, jangan hanya matrik kayak gini kan kita enggak tahu 50M itu diambil dari Dirjen mana, dari mana itu, itu aja.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya nanti begini Pak Askwen, kita buat satu poin supaya pergeseran yang dialokasikan dari anggaran Kementerian Agama disampaikan di rapat berikutnya. Ya, jadi diambil dari mana saja dan program penajaman program.

Jadi tidak malam ini kita bahas, kalau kita bahas satu-satu lagi nanti mungkin nggak cukup sampai besok.

Hal yang sama di dua badan pengalokasian anggaran ini akan kita rapat lagi di hari-hari berikutnya.

Silakan Pak Abidin.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin, Bapak Pimpinan.

Soal penulisan aja itu. Coba angka yang paling atas dari atas, Mas.

Penulisan angka-angka. Karena ini kesimpulan, itu kan langsung dimasukkan aja, nggak usah dalam ribuan gitu. Tulis aja langsung, tambahin aja nolnya. Nah, kan biar sekali baca selesai. Nah, tambahin lagi nolnya, jadi langsung bunyi dia.

Nah, untuk mengakomodasi apa pertanyaan dari anggota, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk, ini usul dulu ya, nanti kita berbicara, Kementerian Agama untuk menyusun rincian realokasi anggaran, iya, alokasi anggaran, apa, iya dari Eselon I, iya kan betul kan, satu, yang dialokasikan untuk BPH dalam rapat dan disampaikan dalam rapat.

Apa, kita mau konsinyering atau apa?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Terserah.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Dalam rapat berikutnya apa? Dalam rapat, dalam raker aja, dalam raker dengan Komisi IX, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII.

Jadi disusun aja ini ya, biar kita tau yang dipindah dimana gitu kan. Nah, komisi selanjutnya, ini usulan ya nanti kita apa bisa di ini, oh udah sudah cukup?

Ya, enter, nah, Komisi VIII DPR RI mendesak, apa Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Soal apa, penggunaan anggaran sudah.

Ya, ini kan maksudnya akan di penerimaan negara bukan pajak.

**ANGGOTA KOMISI VIII RI:**

Itu BPH sama BPJPH itu dua-duanya.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

BPNBP, BNPB.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Ya, kan. Betul kan.

Badan ini kan ada pendapatan negara bukan pajak. Nah, ini harus di Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPJPH untuk meningkatkan proyeksi, Pak. Untuk Komisi DPR RI, mendesak Kepala BPJPH menyusun proyeksi. Ya, proyeksi penerimaan negara bukan pajak.

Kan bisa diperkirakan itu kan. Jadi, kita tahu juga nanti sertifikasi apa segala macam, proyeksinya berapa sih penerimaan negara bukan pajak.

Saya kira itu ini ya.

Ya. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPJH RI untuk menyusun proyeksi penerimaan PNPB itu kan, penerimaan negara bukan pajak.

Oke, pendapatan Badan Layanan Umum ya, penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum.

Iya titik.

Ini usul ya buat anggota, mungkin ada yang lain melalui Pimpinan, silakan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Tinggal ini satu lagi. Pak Askweni tadi.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin Pak Ketua tadi Pak Askwen sudah?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Belum, belum.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Komisi VIII, sama tadi seperti yang di poin dua itu coba, pada saat Kepala Badan BPH untuk menyusun rincian anggaran.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin ini di nomor tiga, nomor empat itu jadi nomor tiga karena Kementerian Agama menjelaskan realokasinya, dapatnya 179 itu, baru Kepala BPH juga harus menyusun rinciannya, kemana tuh alokasinya, kan begitu ya?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya itu sama.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Jadi urutan aja, urutannya.

Nah baru.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Dia nanti akan ada menyusun proyeksi, penggunaan rincian penggunaan anggaran, dan menyusun proyeksi itu.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Kami mendesak BPH untuk menyusun mas, rincian anggaran. Menyusun rincian anggaran sebesar yang 400 miliar tadi.

Penggunaan anggaran.

Yang diketik itu itu mestinya yang untuk BPH bukan BPJ.

Oke, sama juga.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Baru kemudian proyeksi, itu ya Pak, gitu ya.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Oke, cukup?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Ya, dihapus.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Ada tambahan mungkin?

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Oke, sebentar. Dikubisi dulu, di anggota dulu, nanti kita serahkan ke teman-teman di sini.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sudah?

Dari anggota masih ada? Cukup ya.

Kami persilakan pemerintah. Menteri Agama, BPH maupun BPJPH.

**WAKIL KEPALA BPH (DAHNIL AZHAR SIMANJUNTAK):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Dari kami ada beberapa poin. Pertama, singkatan BPH RI itu jadi BP Haji RI, itu penting karena penyebutannya lebih enak, BP Haji RI, BP Haji RI.

Kemudian yang kedua, perlu juga agaknya dimasukkan penjelasan bahwasannya Rp179 miliar yang dialokasikan dari realokasi anggaran Kementerian Agama ini akan digunakan untuk persiapan pelaksanaan haji 2026, sedangkan operasional penyelenggaraan haji di 2025 BP Haji RI itu mengikuti penganggaran, alokasi anggaran yang ada di PHU. Artinya, kegiatan-kegiatan kita, seperti tadi disarankan oleh Ketua Komisi, itu melekat dengan teman-teman di PHU.

Demikian, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Coba ke poin yang tadi, yang mendesak itu, mendesak penggunaan rincian anggaran.

BP Haji, BP Haji.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin Pimpinan, izin pemerintah, izin Pimpinan.

Ini soal nomenklatur. Ini kita pegangan Perpres, Perpresnya itu Badan Penyelenggara Haji yang selanjutnya disebut Badan merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden dan seterusnya.

Jadi, namanya itu Badan Penyelenggara Haji. B besar, P besar, H besar. Tidak ada di, itu nomor, ini Perpres, Pak. Tidak disebutkan disingkat BP Haji RI, nggak ada.

Ya BPH, karena nomor, nah ini B besar Pak. B besar, P besar, H besar, jadi BPH. Ini Perpres-nya Presiden kita. Begitu, mohon izin Pak Dahnil ya. Soal apa, soal *taste* ya, selera itu nggak boleh keluar dari sini, Perpres.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, nanti kita usulkan di Undang-Undang Haji, BP Haji namanya.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Mestinya tidak BP Haji.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Hei, kembali ke poin tadi. Jangan dulu itu.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Itu mestinya tidak BP Haji saja, BP Haji dan Umroh.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Eh, tadi usulan harus disebutkan, Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPH RI.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Ini sebenarnya cukup, Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Tidak cukup, permintaan badan harus disebutkan bahwa pengalokasian 179 ini untuk persiapan, anggaran persiapan haji tahun 2026. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mengikuti anggaran yang ada di Dirjen PHU.

Apa?

Bukan 50 miliar, seluruhnya ini 179 ini untuk 2026, tapi termasuk disini untuk SOTK gajinya.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Dan SOTK.

**WAKIL KEPALA BPH (DAHNIL AZHAR SIMANJUNTAK):**

129 itu belum termasuk SOTK.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

179 masuk?

**WAKIL KEPALA BPH (DAHNIL AZHAR SIMANJUNTAK):**

179 ini masih persiapan, jadi SOTK itu sebenarnya kalau tadi kalau kembali bicara ideal maka 300-an tadi. Jadi, oleh sebab itu, ini 179 ini persiapan dengan asumsi kami, SOTK itu ya tadi, kami melakukan efisiensi, efisiensi, jadi kami baru berdiri harus melakukan efisiensi habis-habisan terkait dengan ini.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oke.

Lanjut, poinnya lanjut.

Dalam pelaksanaan, dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, BPH yang memakai anggaran yang, apa kalimatnya yang pas ini, memakai, menggunakan anggaran yang ada di Dirjen PHO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nanti kalau tidak disebutkan begini menjadi anggarannya badan semuanya, jadi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturannya peraturan Pak Hilman.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Itu apa mau Pak Hilman?  
Mau.

Oke, masih ada tambahan? Oke, kita tanya Pak Menteri. Tapi sebetulnya yang tahu ini Pak Hilman ini. Bunyi ini, langsung aja kita tanya Pak Hilman. Mengganggu enggak? Kalau masih mengganggu, bubar lagi kita ini.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. KH. NASARUDDIN UMAR, MA):**

Tidak terlalu besar jumlahnya Pak, dari SDM dan lain-lain. Jadi.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Enggak, makanya nanti begitu mau berangkat, pemantauan, Bapak kasih anggarannya, gitu saja. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, bukan menjadi miliknya badan, jadi sesuai peruntukan itu, oh kami melaksanakan ini, gitu. Enggak ada masalah kalau begitu. Oke.

Kita masuk ke BPJPH, enggak ada hal di sini.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Perlu di atur enggak ini?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Yang mana?

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Antara Dirjen PHO dengan Badan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Yang mana Pak?

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Penggunaan itu.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Enggak. Sesuai ketentuan yang berlaku.

Ini cukup ya menjadi pendoman ya untuk kita semua, Menteri Agama, Badan Haji, tentu kami penengah. Sekarang kita baru geser BPJPH, ada lagi yang perlu ditambah? Cukup?

Saking yakinnya anggaran ini tidak berubah dia mau duluan pulang.  
Kalau sempat pulang Pak, ini kita alokasikan sedikit ke BPH.  
Sudah ada tadi.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, silakan.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Pak Ketua, perlu batasan waktu itu Pak Ketua, kan ada bikin rincian atau apa segala macam itu.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Rapat berikutnya tadi.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Nanti kapan? Harus ke.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Tergantung kita yang meminta, nanti kita menyurati.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Nggak ditentukan sekarang?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Nggak* bisa kita tentukan Pak, kita juga nggak tahu waktu kita.  
Tergantung kita, kalau sudah tiba saatnya punya waktu kita, kita surati mereka.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Oke.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ini bukan forumnya di mitra kita, forumnya di kita. Kalau ada waktu kita, kita minta, kita undang.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Nggak dikasih batasan waktu, sampai sekian waktu misalnya?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Nggak ada batasan, kapan saja sampai selesai ini, urusan ini.  
Gimana? Maksudnya Pak Abdul Fikri gimana waktunya? Kapan?

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Udah kan rincian, harus membuat rincian. Itu disiapkan harus disampaikan ke sini, harus disampaikan ke Komisi VIII.

Itu selanjutnya membuat rincian.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Gini Pak Abdul Fikri, kalau rincian tertulis dikirim ke sini, konsekuensi hukum nggak ada. Harus kita ketok. Ketoknya itu tergantung waktu kita. Kalau kita punya waktu, kita surati. Pak BPJPH, kami minta jelaskan pada tanggal sekian, begitu. Jadi, forumnya bukan mereka yang tentukan. Bukan, bukan mitra kita, kita yang meminta. Kalau kita sebut nanti kita tidak undang, apa-apa kan undang kita, sudah lewat waktunya, salah kita lagi Pak.

Cukup?

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

Cukup, tapi tanggalnya itu Pak Ketua, sudah bukan tanggal 4 lah.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oh iya setuju kalau itu.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

Jadi karena keputusan rapat ini mengikat, apa yang diminta diputuskan dalam rapat ya dikerjakan oleh Kementerian dan Badan. Soal kapannya kita yang tentukan. Berdasarkan rapat ini, maka kita minta itu, gitu lho.

Jadi jangan nunggu lagi. Kan jangan nunggu lagi, nanti kita minta, kita minta waktu lagi gitu, kan. Waduh.

Oke ya?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Oke ya?

Dapat kita setuju semua keputusan ini Pak Menteri?

Dengan demikian, mari kita sepakati kesimpulan yang kita musyawarahkan hari ini saya tidak membacakan lagi satu per satu sebagaimana yang kita sepakati tadi.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Ternyata sudah melewati jam 01.00. Karena sebentar lagi sudah masuk persidangan paripurna kalau ada yang berkenan tidak pulang lagi ya dipersilakan saja, atau besok kesini lagi kan, ngapain kita pulang?

Sebelum kami tutup rapat ini Pak Menteri, bila sudah ada kesepakatan, kesepakatan antara Menteri dengan Badan, kami menunggu secepatnya Usulan Penyelenggaraan Haji 2025. Kami punya waktu karena besok sudah rapat paripurna, para anggota ini harus, kami ini Pak Menteri, begitu dilantik, diketok, dilantik hari ini, kami sudah berpikir terpilih kembali, terpilih kembali itu sarannya termasuk reses. Kami masuk reses, maka para anggota ke Dapil. Kami punya waktu sampai di tanggal 20 Januari. Namun, demikian kami mempertaruhkan diri. Kami akan tinggalkan Dapil demi umat. Maka kami alokasikan tanggal 30-31 itu sudah diusulkan di tanggal 30, paling lambat, tanggal 31 kita sudah membentuk panja, tanggal 1 tahun baru, tanggal 2 kita sudah rapat panja, rapat panja, rapat panja, rapat panja, rapat panja. Kalau bisa tanggal 10 Januari kita sudah putuskan.

Tergantung pemerintah. Pada prinsipnya, layanannya meningkat, ongkosnya turun. Seperti apa cara menyepakati itu, nanti kita bahas di rapat-rapat berikutnya.

Kami sudah mendapatkan izin dari Pimpinan DPR RI, kita memakai alokasi waktu tanggal 23 Desember sampai di tanggal 20 Januari untuk pembahasan rapat-rapat panja kita. Kami kira tanggal 23-20 Januari itu atau dari tanggal 13-23 Desember itu cukup sempit waktunya bagi DPR RI untuk melakukan pembinaan Dapil.

Kembali lagi kami menyebutkan, kami pertaruhkan, akan dicacimakilah kami karena tidak sampai di Dapil kami semua. Saya punya dapil 19 kabupaten kota Pak Menteri, kalau saya kunjungi semua itu satu-satu per kabupaten, dua titik, tidak ketemu kita waktunya di sini untuk tanggal 30 itu, karena itu kami tetap semangat, kalau boleh sudah diajukan sebelum tanggal 30, nanti kita alokasikan waktu pembahasan di tanggal 30, penyampaian saja dulu, nanti kita lanjut, tapi kan sudah bersama badan ini. Tidak seperti kemarin, jadi ada tanda tangan badan juga, ada tanda tangan Pak Menteri juga nanti

Demikianlah Pak Menteri.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. KH. NASARUDDIN UMAR, MA):**

Ya nanti kita bahas, Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Jadi kira-kira begini, ini di luar agenda kita, tapi hanya menyampaikan saja Pak Menteri, kami baru pulang, mendarat tadi jam tiga, langsung ke sini, kita rapat, tidak berhenti sampai sekarang, kami sudah menelusuri semua siklus perhajian kita di sana.

Kami berkenan memutuskan sebelum ada keputusan panja, bila dibutuhkan anggaran untuk memastikan area yang akan kita pakai, kami akan putuskan boleh dipakai anggaran, sebelum ada keputusan panja. Tetapi ya harus transparan, kebutuhannya berapa, ya harus begitu, jangan mendesak terus mengambil kesempatan. Nah, itu panjang lagi nanti ceritanya.

Kami sudah sampai prinsip itu Pak Menteri, supaya tidak terganggu siklus kita, kita mendapatkan area yang baik sebelum ada keputusan panja kita alokasikan dulu. Kita perintahkan BPKH, keluarkan anggaran untuk itu.

Sebelum kita tutup, kami persilakan Menteri untuk mewakili semua mitra kerja kami malam ini, sebelum kita tutup.

Silakan, Pak.

**MENTERI AGAMA RI (Prof. Dr. KH. NASARUDDIN UMAR, MA):**

Bapak Ibu sekalian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Atas nama kami bertiga, Kementerian Agama, BP Haji, dan juga Badan Halal ya. Pertama, memohon maaf karena waktu yang tersita begitu panjang, hanya karena menunggu sesuatu yang dari kami berdua, itu jelas ini adalah satu hal yang kami pantas untuk memohon maaf kepada Bapak yang mulia. dan Ibu.

Kemudian yang kedua, kami sangat senang mendengarkan pernyataan terakhir Pak Ketua menyangkut masalah penggunaan anggaran haji yang tadi BPKH itu ya, karena memang pihak Saudi Arabia juga menuntut kita untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk belanja haji ini.

Dan yang terakhir, *insya Allah*, kami mendoakan pada Bapak Ibu yang mulia selamat menjalankan tugas resesnya dan *insya Allah* kami juga di belakang akan mencoba lebih merapikan, mudah-mudahan tidak terulang lagi rapat seperti ini, hanya ya maklum karena semuanya serba baru di sini, dan *insya Allah* ke depan kami akan mencoba lebih rapi dan lebih kompak dan lebih cepat karena kami sangat yakin bahwa diantara kami ini adalah sesungguhnya

tujuan kami satu adalah menyukkseskan ibadah haji dan program-program kami semuanya.

Saya kira cukup, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Menteri, Wakil Menteri, Sekjen beserta jajaran. Terima kasih Kepala Badan Penjaminan Produk Halal bersama Wakil, Pak Aprian Sahnur. Terima kasih Pak Gus Irfan dan sahabat kita, Dahnil Anjar. Ini jangan mentang-mentang muda, kita dihajar terus ya.

Terima kasih juga para anggota dan Pimpinan yang berkenan. Ini sudah ternyata sudah setengah dua, mudah-mudahan amal ibadah kita ini menjadi dapat melayani umat kita dengan baik dan mari kita tutup rapat kita dengan ucapan *hamdalah*.

*Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin.*

**(KETUK PALU 3 KALI)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 01.25 WIB**

**a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**TTD**

**Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.  
NIP. 197106242000031003**